

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2014 yang merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang terdiri dari 51 Sasaran Strategis dengan 137 Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata tingkat capaian sebesar 78.45 % dengan kategori Baik.

Beberapa prestasi dengan anugrah penghargaan sampai dengan tahun 2014. Sebagai berikut:

1. Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik “Kemitraan Bidan Dukun Beranak” dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Penghargaan “Informasi tersedia setiap saat tingkat Provinsi Aceh (Juara II) untuk kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Menpan dan RB dengan Predikat “C” .

KATA PENGANTAR

Alhamduillah rabbi'l'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridhanNya, Pemerintah Aceh Singkil telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2014. Sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Aceh Singkil dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013-2017.

Secara substantif Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap kinerja pada setiap Sasaran Strategis. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singki secara normative telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam penyajian ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk menyempurnakan laporan kinerja ini.

Demikian kiranya laporan ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Terima kasih.

Aceh Singkil, Maret 2014


H. SAFRIADI, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sejarah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	2
1.2.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bupati.....	2
1.2.2 Organisasi Perangkat Daerah.....	5
1.3 Lingkungan Strategis	8
1.4 Isu-Isu Strategis	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Perencanaan Strategis	17
2.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014	34
2.4 Perjanjian Kinerja	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	53
3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.....	54
3.2 Realisasi Anggaran.....	110
BAB IV PENUTUP	116
LAMPIRAN 1 PENETAPAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan.....	20
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.....	23
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014	34
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	44
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP Tahun 2014	54
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Pertama	54
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja	55
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Kedua.....	56
Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga	58
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja Jangka Menengah.....	61
Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat.....	62
Tabel 3.8 Perbandingan realisasi dengan tahun lalu	63
Tabel 3.9 Perbandingan target tahun ini dengan target Renstra	64
Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kelima.....	64
Tabel 3.11 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis keenam.....	65
Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis ketujuh	66
Tabel 3.13 Perbandinga realisasi denga tahun lalu Sasaran Strategis ketujuh	67
Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kedelapan	68
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu.....	69
Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh.....	69
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2013	70
Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2013	72
Tabel 3.19 Tingkat Penyelesaian Temuan BPK RI Perwakilan Aceh dan APIP tahun 2014	74
Tabel 3.20 Perbandingan realisasi dengan tahun lalu.....	75

Tabel 3.21 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas	76
Tabel 3.22 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Belas	77
Tabel 3.23 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga Belas	77
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Kabupaten Aceh Singkil	9
Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Singkil	10
Gambar 1.3 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Aceh Singkil	12
Gambar 1.4 Persentase Penduduk yang berobat jalan	13
Gambar 3.1 Kegiatan Pelatihan Anyaman Pandan Tahun 2014	56
Gambar 3.2 Produk/Hasil Pelatihan Anyaman Pandan dan Sulam Tahun 2014	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sehingga memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bagaimana upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 SEJARAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

Sejarah Kabupaten Aceh Singkil yang ada saat ini dimulai dari adanya sebuah kota Singkil yang merupakan daerah pusat kerajaan. Pengembangan daerah ini selanjutnya diteruskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kota Singkil di fungsikan sebagai mana layaknya sebuah kota yang kelahirannya dimulai pada masa penjajahan Belanda sehingga Singkil difungsikan sebagai pusat kota dagang dan pusat pelabuhan dagang dipantai Selatan Aceh, pada masa itu (diperkirakan pada abad ke 15 M).

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah otonom di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil. Pelantikan Bupati Aceh Singkil pertamakali dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud) pada tanggal 14 Mei 1999 di lapangan Daulat Singkil.

1.2.1 TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BUPATI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sector public kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan urusan bersekala Kabupaten/Kota meliputi: perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, perencanaan, dan pengendalian pembangunan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang penyediaan lapangan pekerjaan dan ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan dan pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

Urusan wajib lainnya menjadi kewenangan khusus pemerintah kabupaten/kota adalah pelaksana keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan

Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar ummat beragama, penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam dan peran ulama dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk pemulihan psikososial sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dipimpin oleh seorang Bupati yang dibantu Wakil Bupati. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas: asas keislaman, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan asas kesetaraan.

Adapun tugas dan wewenang Bupati adalah :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Bupati dan DPRK;
2. Mengajukan rancangan qanun;
3. Menetapkan qanun yang telah mendapat persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun tentang APBD kepada DPRK untuk dibahas, disetujui, dan ditetapkan bersama;
5. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh;

6. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRK;
7. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
8. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten kepada masyarakat;
9. Mengupayakan terlaksananya kewenangan pemerintahan;
10. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menguasai kepada pihak lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1.2.2 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil semenjak dilaksanakan otonomi khusus Tahun 2006 telah mengalami beberapa kali perubahan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan

14 Qanun tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Qanun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil. Sesuai dengan Qanun tersebut, Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten dan 8 (delapan) Bagian, yaitu :
 - a. Asisten Pemerintahan, mengkoordinasikan :
 - Bagian Tata Pemerintahan; dan
 - Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
 - Bagian Administrasi Pembangunan;
 - Bagian Perekonomian; dan
 - Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan :
 - Bagian Organisasi;
 - Bagian Umum; dan
 - Bagian Humas dan Protokol.
2. Qanun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Sesuai dengan Qanun tersebut, Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Lingkungan Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :
 1. Dinas Syariat Islam;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Dinas Pendidikan;
 6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 7. Dinas Perhubungan dan Informatika;
 8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

9. Dinas Pekerjaan Umum;
 10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 13. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 17. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan;
 20. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
 21. Inspektorat Kabupaten;
 22. Rumah Sakit Umum Daerah;
 23. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
 24. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 25. Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran; dan
 26. Kecamatan.
3. Qanun Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Qanun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Sesuai Qanun tersebut ditetapkan Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menjadi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
 4. Qanun Nomor 04 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Qanun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil. Sesuai Qanun tersebut ditetapkan beberapa

- perubahan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
5. Qanun Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 6. Qanun Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil.
 7. Qanun Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.
 8. Qanun Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
 9. Qanun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.
 10. Qanun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan. Sesuai Qanun tersebut ditetapkan beberapa perubahan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
 11. Qanun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil. Sesuai Qanun tersebut ditetapkan beberapa perubahan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
 12. Qanun Nomor 03 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.
 13. Qanun Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Qanun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas, Lembaga Teknis

Daerah dan Kecamatan. Sesuai dengan Qanun tersebut ditetapkan beberapa Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Kabupaten dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah.

14. Qanun Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Sesuai Qanun tersebut ditetapkan beberapa perubahan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

1.3 LINGKUNGAN STRATEGIS

1) Keadaan Geografi

a) Letak Geografis

Aceh Singkil sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, letaknya di sebelah selatan Provinsi Aceh yaitu pada posisi 2°02'-2°30" LU dan 97°04"-97°45'00" BT. Kabupaten Aceh Singkil memiliki wilayah seluas 2.187 Km² untuk daratan dan 5.448,68 Km² untuk lautan.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Subulussalam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Trumon;

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Aceh Singkil



b) Luas Penggunaan Lahan

Secara administratif Kabupaten Aceh Singkil terbagi menjadi 11 Kecamatan, 16 Kemukiman dan 120 Desa. Wilayah daratan terdiri dari rawa-rawa, dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah merupakan kawasan yang dominan dimana ketinggian tempat 0-25 m mencakup luas 45,20% selebihnya adalah 25-100 m seluas 36,18%, 100-500 m seluas 9,66%, dan 500-1000 m seluas 8,95%. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil dapat dibedakan atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari : Kawasan Resapan Air, Kawasan Bergambut, Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Wisata Alam dan Kawasan Rawan Bencana. Kawasan ini di dominasi oleh kawasan suaka margasatwa Rawa Singkil dan taman wisata alam.

Kawasan budidaya meliputi Kawasan Pemukiman, Pertanian Lahan Basah, Pertanian Lahan Kering, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Tanaman Tahunan/Perkebunan, Hutan Produksi, Kawasan Peternakan/Pengembalaan dan Pertambakan. Kawasan budidaya didominasi oleh lahan perkebunan yang sebahagian besar merupakan areal perkebunan besar. Sedangkan kawasan perkebunan rakyat belum terkelola baik secara ruang sehingga dikategorikan sebagai bagian dari pertanian lahan kering dan kawasan transmigrasi.

c) Keadaan Iklim

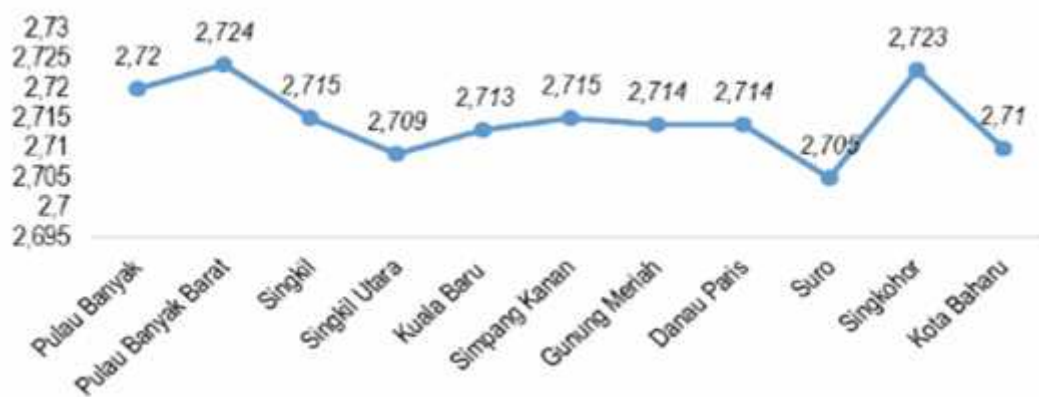
Kabupaten Aceh Singkil beriklim tropis dengan musim kemarau dan musim hujan, musim kemarau tiap tahun berkisar pada bulan Maret sampai dengan Agustus dan musim hujan berkisar antara bulan September sampai dengan Februari.

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

a) Kependudukan

Penduduk Aceh Singkil dari tahun ke tahun terus bertambah, pada tahun 2013 lalu penduduk Aceh Singkil berjumlah 134.563 jiwa, dan pada tahun 2014 jumlah penduduk Aceh Singkil meningkat menjadi 136.352 jiwa, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 1.789 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Gunung Meriah yaitu 42.581 jiwa dan yang terkecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu 2.750 jiwa.

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Singkil, 2013



Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2014

b) Ketenagakerjaan

Pada tahun 2013, jumlah penduduk Aceh Singkil yang berusia 15 tahun keatas sebanyak 67.576 jiwa dan yang termasuk dalam kategori angkatan kerja (*Labor Force*) sebesar 39.921 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebesar 59,08 % mengalami penurunan dibandingkan dengan TPAK tahun 2012. Pada tahun 2013 TPAK penduduk laki-laki sebesar 82,60 % dan TPAK perempuan sebesar 35,24 %. Menurunnya nilai TPAK Aceh Singkil menyebabkan angka pengangguran meningkat.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Aceh Singkil pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 TPT Aceh Singkil sebesar 8,96 % naik menjadi 11,07 % pada tahun 2013.

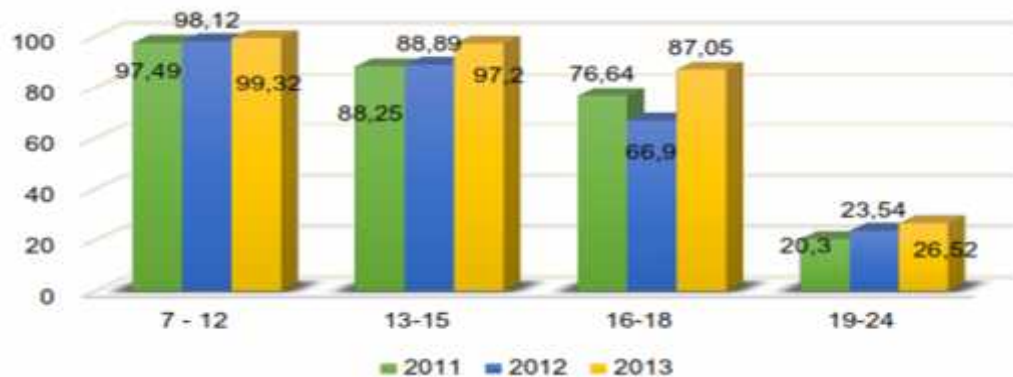
c) Sosial dan Kebudayaan

1) Pendidikan

Pembangunan pendidikan Kabupaten Aceh Singkil sebagai salah satu faktor untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah sesuatu yang mutlak untuk ditingkatkan mutunya. Untuk itu berbagai aspek pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat, peningkatan mutu dan relevansi, serta peningkatan efisiensi dan peningkatan pengelolaan pendidikan pada berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan perlu direncanakan secara matang sehingga pembangunan pendidikan ke masa depan dapat memenuhi amanat UUD 1945 pada umumnya dan mendukung pembangunan daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai daerah otonom.

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam memacu gerak laju pembangunan. Manusia sebagai subjek pembangunan dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya memegang peranan sangat penting. Seringkali tingkat pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan seseorang dalam bidang tugasnya. Berdasarkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013, penduduk Kabupaten Aceh Singkil usia 10 tahun keatas yang belum/tidak tamat SD ada sekitar 28,82 persen; tamat SD mencapai 26,68 persen; tamat SMP mencapai 19,30 persen; tamat SMA mencapai 20,42 persen; sedangkan yang menamatkan universitas hanya 4,78 persen.

Gambar 1.3 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten



Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2014

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kehidupan berjalan baik, maka secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memper-timbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dari ajang peningkatan SDM penduduk Indonesia, maka program-program kesehatan telah dimulai atau bahkan lebih diprioritaskan pada generasi penerus, khusus calon bayi dan anak dibawah lima tahun (balita), Pentingnya pembangunan bidang kesehatan ini tecermin dari deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) yang mana lebih sepertiga indikator menyangkut bidang kesehatan.

Bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi. Persentase balita yang mendapatkan ASI di Kabupaten Aceh Singkil mencapai 99,76 %. Hal ini berkaitan dengan adanya pengetahuan ibu yang lebih baik mengenai pentingnya ASI bagi bayi.

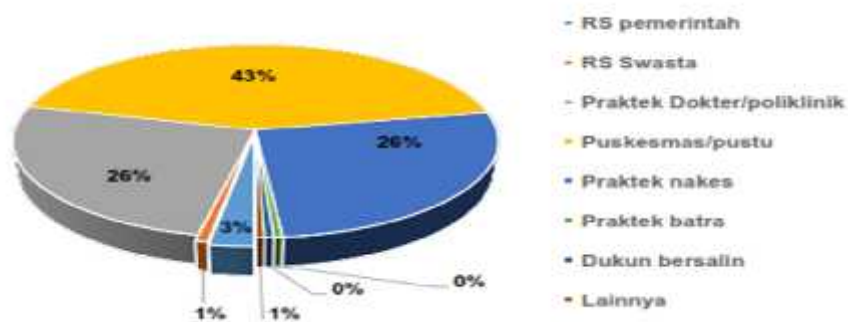
Pemberian kekebalan tubuh melalui imunisasi lengkap sebelum 1 tahun merupakan cara yang efektif untuk mencegah kesakitan dan kematian balita. Pada umumnya imunisasi campak

yang diberikan setelah bayi mendapatkan imunisasi BCG, DPT, dan Polio. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2013 menunjukkan balita yang pernah mendapat imunisasi campak sebesar 70,85 persen.

Persalinan oleh tenaga dokter, bidan atau tenaga medis lain relatif lebih aman dibandingkan oleh dukun atau tenaga non medis lainnya. Pada tahun 2013, sekitar 75,66 persen persalinan balita ditolong oleh tenaga medis, dengan komposisi 11,06 persen oleh dokter, 64,60 persen oleh bidan.

Untuk sarana kesehatan, pada tahun 2013 terdapat sarana berupa puskesmas sebanyak 11 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Disamping puskesmas juga terdapat Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah (tepatnya di Desa Gunung Lagan). Jenis fasilitas kesehatan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk adalah Puskesmas / Pustu (43,00 %) diikuti praktek tenaga kesehatan (26,32 %), praktek dokter / Poliklinik (25,68 %), Rumah Sakit Pemerintah (2,62 %), rumah sakit swasta (0,75%) dan dukun bersalin (0,54%).

Gambar 1.3 Persentase Penduduk yang berobat jalan



Sumber: Aceh Singkil Dalam Angka 2014

d) Ekonomi

Nilai PDRB Aceh Singkil Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2013 mencapai Rp 1.026,66 miliar, meningkat sebesar Rp 112,57 miliar dibanding tahun 2012. Capaian ini mengindikasikan tren peningkatan agregat ekonomi di Aceh Singkil selama empat tahun terakhir. Struktur PDRB Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2013 ditentukan oleh dua sektor utama yaitu : sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertanian masih mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Aceh Singkil dengan kontribusi sebesar 31,24 persen. Sedangkan sector perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 22,58 persen terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Aceh Singkil.

Selama periode 2010 - 2013, perekonomian Aceh Singkil telah menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi (economic structural transformation). Terlihat bahwa kelompok sektor primer (pertanian, pertambangan & penggalian) mengalami tren penurunan kontribusi selama tahun 2010 hingga tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2000 selama kurun waktu tahun 2010–2013 menunjukkan pertumbuhan yang terus menguat. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Singkil mencapai angka 5,08 persen mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 5,01 persen.

Selama tahun 2010 - 2013 pendapatan regional perkapita kabupaten Aceh Singkil terus mengalami kenaikan, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan PDRB Aceh Singkil lebih tinggi disbanding dengan pertumbuhan jumlah penduduknya.

1.4 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan bagian terpenting dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Singkil karena isu strategis ini akan menjadi dasar utama dalam mengukur kinerja pemerintah selama tahun 2014. Identifikasi isu-isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptibilitas prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Penyajian isu-isu strategis Kabupaten Aceh Singkil selama tahun 2014 meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang diselaraskan dengan isu strategis yang berkembang di tingkat Provinsi Aceh dan tingkat nasional, hal ini menjadi pertimbangan karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta memperhatikan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang dijelaskan diatas, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah dan investasi masih rendah.
- b. Indeks pembangunan manusia masih rendah.
- c. Sumber penerimaan daerah khususnya PAD masih rendah.
- d. Sumber pembiayaan untuk pembangunan prasarana dan sarana pembangunan masih terbatas.
- e. Pemberdayaan sektor *economic-base* belum maksimal.
- f. Harga komoditas hasil produksi sektor ekonomi berfluktuasi dan tidak stabil terutama pada saat musim panen raya.
- g. Potensi pariwisata belum dikelola secara optimal.

- h. Pembangunan prasarana sektor industri pengelolaan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan belum optimal.
- i. Factor penunjang produksi dan pemasaran hasil produksi sektor ekonomi belum memadai.
- j. Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam belum optimal.
- k. Ketersediaan dana untuk perencanaan pembangunan daerah masih terbatas.
- l. Pelayanan pemerintah terhadap publik belum maksimal.
- m. Kualitas SDM aparatur pemerintah belum ditingkatkan secara optimal.
- n. Sengketa lahan dengan pemegang HGU Perkebunan.
- o. Daya saing daerah terhadap daya saing regional, nasional, dan internasional masih rendah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang capaian kinerja yang diinginkan dan ditargetkan yang dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program resmi kegiatan. Perencanaan kinerja menjabarkan kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh Pemerintah Daerah dalam tahun yang bersangkutan dengan berpedoman pada rencana strategis atau perencanaan jangka menengah.

Perencanaan Strategis adalah merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Singkil Tahun 2013 - 2017 yang telah direvisi pada tahun 2014 untuk kesempurnaan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 28 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2013-2017 yang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi dan Sasaran sebagai berikut :

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan visi daerah yaitu :

**“TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH MENUJU
MASYARAKAT MANDIRI, SEJAHTERA LAHIR BATIN DAN
BERMARTABAT, BERLANDASKAN NILAI NILAI ISLAMI”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian daerah dari segala bidang komoditas unggulan daerah yang mampu berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun global sehingga kemakmuran suatu masyarakat terpenuhi baik kebutuhan ekonomi (material) maupun sosial (emosional), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi lahir batin secara adil dan merata. Hal ini merupakan prioritas yang akan dicapai selama masa Kepemimpinan Bupati Aceh Singkil Tahun 2013 - 2017, yang ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islami.

2. MISI

Misi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya Visi yang dicita-citakan. Misi mencerminkan keberadaan Tugas Pokok dan Fungsi dari organisasi. Adapun Misi yang dicanangkan dalam RPJMK Aceh Singkil 2013 - 2017 adalah:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Kepuasan Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaran, berwawasan Kebangsaan dan Akhlaqul Karimah;
3. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor *economic base* yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, pasar tradisional serta industri hasil pengolahan serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing;

4. Mewujudkan Sistem dan Iklim Daerah yang Kondusif, Demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Meningkatkan seluruh sumber daya sektor-sektor unggulan lainnya yaitu industri dan pariwisata;
6. Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
7. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera lahir dan batin;
8. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Islami.

3. TUJUAN

Tujuan Pembangunan Aceh ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi sebagaimana tercantum dalam RPJM Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya IPM melalui pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat .
3. Memberdayakan masyarakat berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.
4. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal berdasarkan *economic base*
5. Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata sebagai nilai tambah masyarakat.
6. Mewujudkan Pemenuhan layanan transportasi bagi seluruh masyarakat
7. Mewujudkan Perluasan Lapangan Kerja dan Industri Kreatif.
8. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Sejahtera
9. Mewujudkan penerapan Syariat Islam yang Kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil

Tabel 2.1
Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1	2	3
1	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Kepuasan Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan;	1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan meningkatnya IPM melalui pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
2	2. Mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan Kebangsaan dan Akhlaqul Karimah;	<p>2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat .</p> <p>3. Memberdayakan masyarakat berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah</p>

1	2	3
3	3. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor <i>economic base</i> yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, pasar tradisional serta industri hasil pengolahan serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing;	4. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal berdasarkan <i>economic base</i>
4.	4. Mewujudkan Sistem dan Iklim Daerah yang Kondusif, Demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;	5. Menciptakan iklim daerah yang kondusif . demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal.
5	5. Meningkatkan seluruh sumber daya sektor-sektor unggulan lainnya yaitu industri dan pariwisata;	6. Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata sebagai nilai tambah masyarakat 7. Mewujudkan Pemenuhan layanan transportasi bagi seluruh masyarakat
6.	6. Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan;	8. Mewujudkan Perluasan Lapangan Kerja dan Industri Kreatif

7	7. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera lahir dan batin;	9. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Sejahtera
8	8. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Islami.	10. Mewujudkan penerapan Syariat Islam yang Kaffah dalam kehidupan masyarakat Aceh Singkil

Sumber; RPJM Kabupaten Aceh Singkil 2013-2017

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

IKU	Rumusan Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4
IPM	$IPM = 1/3 [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ $X_{(1)} : \text{Indeks Harapan Hidup}$ $X_{(2)} : \text{Indeks Pendidikan}$ $X_{(3)} : \text{Indeks Standar Hidup Layak}$	SPM	Bappeda
Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	$\frac{\text{Jumlah siswa yang tertampung pada PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	SPM	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Siswa SD/MI usia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100\%$	SPM	
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMP/MTs usia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100\%$	SPM	
Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	SPM	Dinas Pendidikan
Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah lama siswa duduk di bangku sekolah}}{\text{Jumlah lama duduk dibangku SD/SMP/SMA}} \times 100\%$	SPM	Dinas Pendidikan

Angka melek huruf usia 15-24 tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk >15 tahun keatas melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk usia >15 tahun keatas}} \times 100\%$	SPM	
Jumlah SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik 35%	$\frac{\text{Jumlah Guru berkualifikasi S-1}}{\text{Jumlah Guru di Kabupaten Aceh Singkil}} \times 100\%$	SPM	
Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan = $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jml seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	SPM	Dinas Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani = $\frac{\text{Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada*}} \times 100\%$	SPM	
Cakupan kelurahan/desa Uci	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) = $\frac{\text{Jumlah desa /kelurahan UCI}}{\text{Jumlah seluruh desa/kelurahan}} \times 100\%$	SPM	Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan anak balita	<p>Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pd waktu tertentu</p> <p>Cakupan pelayanan anak balita $\frac{\text{Jml anak balita yg memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pd waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yg sama}} \times 100\%$</p>	SPM	Dinas Kesehatan
Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	<p>Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat Makanan Pendamping - ASI</p> <p>Cakupan pemberian makanan pendamping ASI $\frac{\text{Jumlah anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin yg mendapat Makanan Pendamping - ASI}}{\text{Jumlah seluruh anak usia 6 – 24 bln keluarga miskin}} \times 100\%$</p>	SPM	Dinas Kesehatan
Cakupan peserta KB aktif	<p>Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu</p> <p>Cakupan peserta KB aktif $\frac{\text{Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Seluruh PUS di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$</p>	SPM	Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare	$\frac{\text{Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk} \times \text{Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Penduduk < 15 tahun}} \times 100\%$	SPM	Dinas Kesehatan
Cakupan yankesdas masyarakat miskin	$\frac{\text{Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani}}{\text{Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	SPM	Dinas Kesehatan
Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	PAD/Penerimaan Daerah*100%	Renstra SKPD	DPKKD
Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil evaluasi BPK	Renstra SKPD	
Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	$\frac{\text{Jumlah legislasi yang diterima per tahun}}{\text{Jumlah produk hukum yang disahkan}}$	Renstra SKPD	Setdakab

[Pick the date]

LAPORAN KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 2014

Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	$\frac{\text{Nilai capaian system AKIP tahun lalu}}{\text{Nilai capaian AKIP tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Setdakab
	$\frac{\text{KK yg diterbitkan}}{\text{kepala keluarga}} \times 100\%$		
Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	Tingkat prestasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi inspektorat Aceh/BPKP Aceh	Renstra SKPD	
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	$\frac{\text{KTP elek. yg diterbitkan}}{\text{penddk. wajib KTP elekt.}} \times 100\%$	SPM	Disdukcapil
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	$\frac{\text{kutipan akta kelahiran yg diterbitkan}}{\text{kelahiran yg terjadi}} \times 100\%$	SPM	
Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	$\frac{\text{kutipan akta kematian yg diterbitkan}}{\text{kematian yg terjadi}} \times 100\%$	SPM	
Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	Perolehan medali emas, perak dan perunggu dalam setiap event Tk Daerah maupun Tk Nasional	SPM	

[Pick the date]

LAPORAN KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 2014

Tingkat produksi komoditi : Padi, Jagung, Palawija	Jumlah hasil produksi, komoditi Padi, Jagung dan Palawija per tahun	SPM	Dinas Pertanian
Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	$\frac{\text{Jumlah ternak tahun lalu}}{\text{Jumlah ternak tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Dinas Peternakan dan Keswan
Meningkatnya reboisasi hutan dan penghijauan lahan	$\frac{\text{Jumlah reboisasi hutan dan penghijauan lahan tahun lalu}}{\text{Jumlah reboisasi hutan dan penghijauan lahan tahun berjalan}} \times 100\%$	Renstra SKPD	Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Tingkat produksi komoditi Sawit	Hasil produksi sawit per ha / tahun	Renstra SKPD	
Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	Jumlah hasil penangkapan ikan laut /tahun	Renstra SKPD	Dinas Perikanan dan Kelautan
Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	Jumlah hasil Produksi Perikanan Air Tawar /tahun	Renstra SKPD	
Jumlah Koperasi yang aktif	Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	Renstra SKPD	Disperindagkop UKM
Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah Koperasi yang dilihat dari lembar hasil evaluasi	Renstra SKPD	

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	$\text{SPM Kecepatan} = \frac{\sum^{\text{akhir tahun pencapaian SPM}} \text{Panjang jalan memenuhi kriteria kecepatan}}{\sum^{\text{Seluruh PK}} \text{Panjang Jalan Penghubung PK}}$	SPM	
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	$\text{SPM Air Minum} = \frac{\sum \text{Masyarakat Yang memiliki Akses Air Minum Yang Aman}}{\sum \text{Jumlah Penduduk Kabupaten Kota Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}$	SPM	Dinas PU
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	$\frac{\text{Jumlah kumulatif kawasan permukiman kumuh yang telah tertangani di Kota Pada akhir Tahun Pencapaian SPM}}{\text{Jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota di Kab/Kota}}$	SPM	Dinas PU
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\text{Rumah layak huni}}{\text{Rumah}} \times 100 \%$	SPM	Dinas PU
Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan dini dan penanggulangan bencana}}{\text{Jumlah bencana per tahun}} \times 100 \%$	Renstra SKPD	BPBD

Jumlah objek wisata	Jumlah Objek Wisata	SPM	Disbudparpora
Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	Luas Penanaman Taman Jalan utama/Luas areal penanaman Jalan Utama x 100%	SPM	BAPEDALDA
Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	$\text{Persentase (\% PMKS dalam 1 tahun yang memperoleh bantuan sosial)} = \frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS skala kabupaten/ kota dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100$	SPM	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

<p>Persentase (%) Keluarga Miskin Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya</p>	<p>Persentase (%) korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</p>	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100$	<p>SPM</p>	
<p>Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosial</p>	<p>Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun.</p>	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun darurat lengkap dalam 1 tahun.}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}$	<p>SPM</p>	<p>Dinas Sosial dan Tenaga Kerja</p>

[Pick the date]

LAPORAN KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 2014

Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	$\frac{\text{pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{pencari kerja yang terdaftar}} \times 100$	SPM	
Indeks Keluarga Sejahtera	$\frac{\text{PUS yg usia istrinya} < 20 \text{ th}}{\text{PUS yg usia istrinya } 15 - 49 \text{ th}} \times 100$	SPM	BPPKS
Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	Jumlah pelaksanaan Syi'ar Dakwah dan peribadatan selama satu tahun	RENSTRA SKPD	Dinas Syariat Islam
Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)	Jumlah Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	RENSTRA SKPD	

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2013-2017 yang berisikan perencanaan bersifat makro sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang bersifat lebih mikro setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 mengacu pada RPJMD Tahun 2013 dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 sebagaimana tertera dalam tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.	1) Indeks Pembangunan Manusia	76%
2. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.	2) Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	44
	3) Angka Partisipasi Murni SD/MI	106%
	4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	85,00%
	5) Angka Partisipasi Murni SMA/MA	125%
	6) Rata-rata lama sekolah	9,54%
	7) Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,9%

3. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	8)	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	96.09%
	9)	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	74.55%
	10)	Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	96.27 %
	11)	Cakupan pelayanan nifas	94.91%
	12)	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	73.55%
	13)	Cakupan kunjungan bayi	96.18%
	14)	Cakupan kelurahan/desa Uci	95.36%
	15)	Cakupan pelayanan anak balita	89.64%
	16)	Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	81.82%
	17)	Cakupan peserta KB aktif	75.91%
	18)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare	100%
	19)	Cakupan yankesdas masyarakat miskin	97.73%
	20)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%
	21)	Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%
4. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	22)	Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1650 Pasien
	23)	Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	80 Pasien
5. Meningkatnya standar Mutu Pelayanan Rujukan, rawat jalan dan dan rawat inap	24)	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	12 Unit
	25)	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan	40 Unit
6. Meningkatnya sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah	26)	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	80 %
	27)	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	80 %
	28)	Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPD	80 %
	29)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	10 Jenis
7. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang	30)	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	96%

transparan dan akuntabel	31)	Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	96%
	32)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP (Kategori)
8. Meningkatnya fasilitas penanganan konflik pertanahan daerah	33)	Jumlah Fasilitasi konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	4HGU
9. Meningkatnya pengembangan pembangunan desa	34)	Jumlah Tapal Batas Desa yang diselesaikan	30 Desa
	35)	Jumlah Desa yang memiliki Peta Administrasi	16 Desa
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	36)	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 SKPD
	37)	Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	55 %
	38)	Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	3 (Peringkat)
	39)	Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	150 (Rekomendasi)
	40)	Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	8 Qanun 29 Perbup
	41)	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus
	42)	Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-undangan	10 Proleg
11. Meningkatnya Legisasi Peraturan Perundang-undangan	42)	Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-undangan	10 Proleg
12. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	43)	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian	1 Unit
13. Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	44)	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	35237 KK
	45)	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	86872 KK
	46)	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	4649 AK
	47)	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	3 KARTU
14. Meningkatnya pembinaan desa/kampung	48)	Jumlah Kampung yang dibina	10 Desa
	49)	Jumlah Kampung yang dinilai	11 Desa
15. Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat	50)	Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	12 Tropy

16. Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.	51) Jumlah Pembinaan partai politik	15 Parpol
	52) Jumlah Organisasi dan LSM yang terinventarisir	44 LSM
17. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	53) Jumlah Izin yang diterbitkan	1334 Izin
18. Meningkatnya Produktivitas pertanian dan Pembinaan Lembaga petani	54) Tingkat produksi komoditi : a. Padi b. Jagung c. Palawijaya	5593 Ton 200 Ton 1000 Ton
	55) Luas Lahan Tanam	2688 Ha
	56) Jumlah Penyuluhan petani	2 Kali
	57) Jumlah pelatihan petani	2 Kali
19. Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dan kesehatan hewa dalam rangka pencapaian swasembada daging	58) Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	2.7 %
	59) Angka Kesakitan Hewan	22 %
20. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	60) Meningkatnya reboisasi hutan dan penghijauan lahan	5 Ha
	61) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	194 Ha
	62) Luas kerusakan kawasan hutan	79.5 Ha
21. Meningkatnya produksi Perkebunan	63) Tingkat produksi komoditi : a. Sawit b. Karet	155 Ton
	64) 1) Luas Lahan Tanam	46.5 Ha
22. Meningkatnya produksi Perikanan	65) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	11.528 Ton
	66) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	32 Ton
	67) Jumlah sarana dan Prasarana perikanan	22 Unit
23. Meningkatnya pembinaan Koperasi	68) Jumlah Koperasi yang aktif	97 Unit
	69) Jumlah Koperasi yang sehat	30 Unit
24. Meningkatnya pembinaan UKM	70) Persentase UKMK yang mengembalikan dan bergulir	14 %

25. Terakomodirnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat dan laut	71)	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	33.33 %
	72)	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	40 %
	73)	Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40 %
	74)	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	33.33 %
	75)	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	33 %
	76)	Tersedianya unit penguji kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	25 %
	77)	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan	50 %
26. Optimalisasi Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten	78)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pad Kabupaten Kota yang telah memiliki terminal	20 %
	79)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	37.5 %
	80)	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah	33.33 %

	yang telah ditetapkan lintas penyebarangan dalam kabupaten/kota	
27. Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat	81) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	40 Ha
	82) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	5 Km
	83) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	7 Km
	84) Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	10 Km
	85) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	10 Km
	86) Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	35 Km/Jam
	87) Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	1500 Jiwa
	88) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	30 Unit
	89) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	20 Unit
	90) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	1331 M
	91) Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5 Ha
28. Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau	92) Cakupan ketersediaan rumah layak huni	140 Unit
	93) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	500 KK

29. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	94) Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 Desa
30. Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya	95) Jumlah pelestarian situs resmi daerah	1 Unit
31. Pengurangan resiko bencana	96) Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	90 %
32. Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata.	97) Jumlah objek wisata	7 Lokasi
	98) Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	a. 20.000 b. 5.000
33. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	99) Cakupan Kajian Seni (50%)	10 %
	100) Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	5 %
	101) Cakupan Gelar Seni (75%)	15 %
	102) Misi Kesenian	100 %
	103) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	5 %
	104) Cakupan Tempat (100%)	100 %
	105) Cakupan Organisasi Bidang Kesenian	100 %
34. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana taman kota dalam rangka mengurangi pemanasan global.	106) Jumlah pembangunan taman kota	20 %
	107) Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	25 %
	108) Penetapan luas kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	20 %
35. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	109) Jumlah peralatan laboratorium lingkungan	20 %
	110) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	28.565 %
	111) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	20 %
	112) Peningkatan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	25 %
36. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Danau, Sungai dan Laut terhadap pencemaran oleh limbah domestik.	113) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Danau	12.5 %
	114) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Sungai	20 %
	115) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Laut	20 %

37. Meningkatkan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam	116) Jumlah alat pemantau curah hujan, suhu dan kelembaban udara	42.86%
	117) Cakupan wilayah yang terpantau curah hujan, suhu dan kelembabannya	14.28%
	118) Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan	50 %
38. Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	119) Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	20 %
	120) Cakupan Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	500 Orang
	121) Persentase (%) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Yang Memperoleh	50 % 80 Orang
	122) Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
	123) Persentase (%) Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Memperoleh Pembinaan Sosial Melalui Pendidikan dan Pelatoha	37 % 70 Orang
39. Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Fakir Miskin atau Keluarga Rentan	124) Persentase (%) Keluarga Miskin Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	50 % 500 Orang
40. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	125) Persentase (%) Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100 %
41. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Mengevakuasi Korban Bencana Alam	126) Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	80 %
42. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	127) Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosia	25 % 210 Orang
	128) Persentase (%) Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	18 % 175 Orang
43. Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan	129) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	75 %
	130) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	60 %
	131) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan	60 %

	Kewirausahaan		
44. Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan,	132)	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	70 %
45. Meningkatnya Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	133)	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %
	134)	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	50 %
46. Meningkatnya Pemeriksaan Perusahaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan	135)	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45 %
	136)	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%
47. Meningkatnya Perekonomian dan Keterampilan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar	137)	Tingkat Perekonomian Warga Transmigrasi	3 UPT
	138)	Tingkat Keterampilan Warga Transmigrasi	3 UPT
48. Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera	139)	Indeks Keluarga Sejahtera	12.2 %
	140)	Prevalensi peserta KB aktif	10.4 %
	141)	Jumlah Alat Kontrasepsi KB	65000 Set
49. Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan bagi PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	142)	Persentase peningkatan KIE KB / KS	15%
	143)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	100 Orang
50. Terwujudnya Pelayanan KIE KB - KS bagi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif	144)	Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB – Aktif	10.200 Orang
	145)	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	2500 Orang
	146)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB	1150 Orang
	147)	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber - KB	170 Orang
51. Meningkatkan pembinaan KB - KS bagi peserta KB Aktif Pria dan Wanita melalui PPKB yang tersebar di setiap desa / kelurahan	148)	Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB / PKB) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan	13 Orang
	149)	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas d setiap desa / kelurahan	120 Orang

	150) Jumlah kelompok pembinaan	20 Kelompok
	151) Jumlah Petugas KB	60 Orang
52. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	152) Jumlah (unit) MUPEN dan MUYAN	2 Unit
	153) Peningkatan Jumlah KRR	21 Kelompok
53. Meningkatnya fasilitas Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	154) Fasilitas pembinaan KB - KR yang Mandiri bagi masyarakat	11 Kelompok
	155) Persentase peningkatan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak setelah penyuluhan	30 Kelompok
	156) Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan	13 Plkb
	157) Persentase Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU	22 Kelompok
54. Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan masyarakat.	158) Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	25 Kali
	159) Berfungsinya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam	20 Unit
	160) Berfungsinya Sarana dan Prasarana Peribadatan	13 Unit
	161) Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)	20 Kali

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2014 telah menetapkan perjanjian kinerja yang merupakan pernyataan, komitmen merupakan representasi, tekad dan janji untuk mencapai kinerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dalam rencana kinerja tahunan yang telah disusun. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja tahun 2014 telah

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dijabarkan pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.	1) Indeks Pembangunan Manusia	76%
2. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.	2) Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	44
	3) Angka Partisipasi Murni SD/MI	106%
	4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	85,00%
	5) Angka Partisipasi Murni SMA/MA	125%
	6) Rata-rata lama sekolah	9,54%
	7) Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,9%
3. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	8) Cakupan kunjungan ibu hamil K4	96.09%
	9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	74.55%
	10) Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	96.27 %
	11) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	73.55%
	12) Cakupan kunjungan bayi	96.18%
	13) Cakupan kelurahan/desa Uci	95.36%
	14) Cakupan pelayanan anak balita	89.64%
	15) Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	81.82%
	16) Cakupan peserta KB aktif	75.91%
	17) Cakupan pelayanan kesehatan	100%

	rujukan masyarakat miskin	
	18) Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%
4. Meningkatkan Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	19) Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1273 Pasien
	20) Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	80 Pasien
5. Meningkatkan standar Mutu Pelayanan Rujukan, rawat jalan dan dan rawat inap	21) Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	12 Unit
	22) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan	29 Unit
6. Meningkatkan sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah	23) Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	80 %
	24) Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	80 %
	25) Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPD	80 %
	26) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	10 Jenis
7. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	27) Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	96%
	28) Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	96%
	29) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP (Kategori)
8. Meningkatnya fasilitas penanganan konflik pertanahan daerah	30) Jumlah Fasilitasi konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	4HGU
9. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	31) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 SKPD
	32) Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	55 %
	33) Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	3 (Peringkat)
	34) Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	150 (Rekomendasi)
	35) Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	8 Qanun 29 Perbup

	36) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus
10. Meningkatnya Legislasi Peraturan Perundang-undangan	37) Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Proleg
11. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	38) Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian	1 Unit
12. Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	39) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	35237 KK
	40) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	88607 KK
	41) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	4649 AK
	42) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	3 KARTU
13. Meningkatnya pembinaan desa/kampung	43) Jumlah Kampung yang dibina	10 Desa
	44) Jumlah Kampung yang dinilai	11 Desa
14. Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat	45) Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	3 Tropy
15. Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.	46) Jumlah Pembinaan partai politik	15 Parpol
	47) Jumlah Organisasi dan LSM yang terinventarisir	44 LSM
16. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	48) Jumlah Izin yang diterbitkan	1620 Izin
17. Meningkatnya Produktivitas pertanian dan Pembinaan Lembaga petani	49) Tingkat produksi komoditi :	
	a. Padi b. Jagung c. Palawijaya	3231 Ton 200 Ton 1000 Ton
	50) Luas Lahan Tanam	2688 Ha
18. Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dan kesehatan hewa dalam rangka pencapaian swasembada daging	51) Persentase Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	6.3%
	52) Angka Kesakitan Hewan	%

19. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	53) Jumlah reboisasi hutan dan penghijauan lahan	5 Ha
	54) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	194 Ha
	55) Luas kerusakan kawasan hutan	79.5 Ha
20. Meningkatnya produksi Perkebunan	56) Tingkat produksi komoditi : a. Sawit b. Karet	155 Ton 15.5 %
	57) 1) Luas Lahan Tanam	46.5 Ha
21. Meningkatnya produksi Perikanan	58) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	11.528 Ton
	59) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	32 Ton
	60) Jumlah sarana dan Prasarana perikanan	22 Unit
22. Meningkatnya pembinaan Koperasi	61) Jumlah Koperasi yang aktif	87 Unit
	62) Jumlah Koperasi yang sehat	20 Unit
23. Meningkatnya pembinaan UKM	63) Persentase UKM yang mengembalikan dan bergulir	14 %
24. Terakomodirnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat dan laut	64) Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40 %
	65) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	33.33 %
	66) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	33 %

	67) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	25 %
25. Optimalisasi Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten	68) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pada Kabupaten Kota yang telah memiliki terminal	75%
	69) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%
26. Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat	70) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	40 Ha
	71) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	7 Km
	72) Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	10 Km
	73) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	10 Km
	74) Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	35 Km/Jam
	75) Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	1500 Jiwa
	76) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	30 Unit
	77) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	1331 M
27. Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau	78) Cakupan ketersediaan rumah layak huni	140 Unit

	79) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	1180 KK
28. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	80) Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 Desa
29. Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya	81) Jumlah pelestarian situs resmi daerah	1 Unit
30. Pengurangan resiko bencana	82) Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	90 %
31. Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata.	83) Jumlah objek wisata	7 Lokasi
	84) Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	a. 20.000 b. 5.000
32. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	85) Cakupan Kajian Seni (50%)	10 %
	86) Cakupan Fasilitas Seni (30%)	5 %
	87) Cakupan Gelar Seni (75%)	15 %
	88) Misi Kesenian	100 %
	89) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	5 %
	90) Cakupan Tempat (100%)	100 %
	91) Cakupan Organisasi Bidang Kesenian	100 %
33. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana taman kota dalam rangka mengurangi pemanasan global.	92) Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	3500 Bibit Tanaman
34. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	93) Jumlah peralatan laboratorium lingkungan	4 Unit
	94) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	1 Industri
	95) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	1 Industri
	96) Peningkatan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	2 Industri
35. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Danau,	97) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Danau	7 Titik

Sungai dan Laut terhadap pencemaran oleh limbah domestik.	98) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Sungai	5 Titik
	99) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Laut	7 Titik
36. Meningkatkan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam	100) Jumlah alat pemantau curah hujan, suhu dan kelembaban udara	11 Alat
	101) Cakupan wilayah yang terpantau curah hujan, suhu dan kelembabannya	11 Wilayah
	102) Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan	1 Laporan
37. Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	103) Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	57 % (1.456 Orang)
	104) Cakupan Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma (Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosial)	24 % (200 Orang)
38. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	105) Persentase (%) Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100 %
39. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Mengevakuasi Korban Bencana Alam	106) Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	20 % (2.188 KK/Kepala Keluarga)
40. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	107) Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosia	25 % 210 Orang
	108) Persentase (%) Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	18 % 175 Orang
41. Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan	109) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	75 %
	110) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	60 %
	111) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	60 %
42. Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan,	112) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	70 %
43. Meningkatnya Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran Pekerja/ Buruh	113) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %
	114) Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program	50 %

yang Menjadi Peserta Jamsostek	Jamsostek	
44. Meningkatnya Perekonomian dan Keterampilan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar	115) Tingkat Perekonomian Warga Transmigrasi	3 UPT
	116) Tingkat Keterampilan Warga Transmigrasi	3 UPT
45. Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera	117) Indeks Keluarga Sejahtera	12.2 %
	118) Prevalensi peserta KB aktif	10.4 %
	119) Jumlah Alat Kontrasepsi KB	44000 Set
46. Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan bagi PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	120) Persentase peningkatan KIE KB / KS	15%
	121) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	11222 Orang
47. Terwujudnya Pelayanan KIE KB - KS bagi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif	122) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB – Aktif	10200 Orang
	123) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6000 Orang
	124) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB	1150 Orang
	125) Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber - KB	170 Orang
48. Meningkatkan pembinaan KB - KS bagi peserta KB Aktif Pria dan Wanita melalui PPKB yang tersebar di setiap desa / kelurahan	126) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB / PKB) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan	13 Orang
	127) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa / kelurahan	120 Orang
	128) Jumlah kelompok pembinaan	20 Kelompok
	129) Jumlah Petugas KB	60 Orang
49. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	130) Jumlah (unit) MUPEN dan MUYAN	2 Unit
	131) Peningkatan Jumlah KRR	21 Kelompok
50. Meningkatnya fasilitas pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	132) Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan	13 Plkb
	133) Persentase Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – PADU	22 Kelompok
51. Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah	134) Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada	25 Kali

dalam kehidupan masyarakat.	masyarakat	
	135 Berfungsinya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam	20 Unit
	136 Berfungsinya Sarana dan Prasarana Peribadatan	13 Unit
	137 Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)	20 Kasus

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*). tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang. Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan dua rumus yaitu:

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik (*Progress positive*) dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi pencapaian rencana tingkat capaian (*progress negative*) maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat capaian}} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran LAKIP Tahun 2014

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	76 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1 CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

1. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Pertama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks Pembangunan Manusia	70,02 %	69,79%	99,6%

Sumber: Bappeda 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 99,6 % atau dikategorikan **Baik**. Hasil perhitungan IPM ini memberikan gambaran bahwa capain IPM pada tahun 2014 terealisasi sebesar 69,79 % hal ini belum mencapai target secara optimal sehingga capaian kinerja indikator ini masih sebesar 99,6 %, namun apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2013 IPM Kabupaten Aceh Singkil sebesar 69,37 % hal ini mengalami

peningkatan sebesar 0,42 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja IPM dengan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		
	2012	2013	2014
Indeks Pembangunan Manusia	68,98 %	69,34 %	69,79 %

Sumber: Aceh Singkil dalam Angka 2014

Pencapaian realisasi IPM ini apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Pemerintah Aceh, Posisi Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2013 termasuk urutan 22 dari 23 Kabupaten Kota di Aceh. Adapun kabupaten terendah pencapaian IPM adalah Kabupaten Gayo Lues dengan IPM 68,54 % sedangkan IPM tertinggi diperoleh oleh Kota Banda Aceh. Masih rendahnya capaian IPM dipengaruhi oleh angka harapan hidup baru mencapai 65,58 tahun dan penduduk Aceh Singkil usia 10 tahun keatas yang belum atau tidak tamat SD ada sekitar 28,82 % sedangkan yang tamat SD 26,68%, SMP 19,30% SMA 20,42% sedangkan yang menamatkan universitas hanya 4,78% serta pengeluaran rata-rata perkapita sebulan masyarakat aceh singkil baru sebesar Rp 520.597;

Upaya peningkatan IPM terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diantaranya di bidang pendidikan Pemerintah memfasilitasi pemberian bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi masyarakat terpencil bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh (LPSDMA). Peningkatan bidang kesehatan melalui penekanan angka kematian ibu dan anak dalam program Inovasi Pelayanan Bidan & Dukun Beranak dan telah mendapat prestasi dan penghargaan sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Peningkatan Ekonomi melalui

Home Industry berupa mengaktifkan kerajinan anyaman pandan, Eceng Gondok, Kerajinan Sulam serta pemberian bantuan sektor perikanan, perkebunan dan pertanian. Upaya ini dilakukan dalam rangka mencapai target IPM secara bertahap yang terdapat dalam rencana jangka menengah tahun 2017 dengan rencana capaian sebesar 70,08 %.



Gambar 3.1 : Kegiatan Pelatihan Anyaman Pandan Tahun 2014



Gambar 3.2 : Produk/Hasil pelatihan Anyaman Pandan dan Sulam Tahun 2014

2. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 6 Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Sasaran Kedua

Indikstor Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	44 %	42,8 %	97,36
2) Angka Partisipasi Murni SD/MI	97,45%	96%	98.51
3) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	81,65%	80,22%	98,24
4) Angka Partisipasi Murni SMA/MA	94%	92%	97,87
5) Rata-rata lama sekolah	8,03%	7,83%	97,05
6) Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,6%	96,45%	98,82
Rata-rata capaian			96,36

Sumber: Laporan Kinerja DInas Pendidikan 2014

Hasil pengukuran terhadap 6 indikator kinerja diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 96,36% atau dikategorikan **Baik**. Penjelasan mengenai capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Tingkat daya tampung pendidikan PAUD diukur melalui cakupan anak usia dini yang berushah 4 sampai dengan 6 tahun tertampung pada TK/KB/PAUD di Kabupaten Aceh Singkil berjumlah 2165 Orang dengan Jumlah anak berusia 4 sampai 6 tahun sebanyak 5053 Orang dengan capaian 42,8 %.
2. Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI sebesar 96% sedangkan target yang akan dicapai yaitu 97,45% berarti masih ada anak usia sekolah yang tidak tertampung pada SD/MI dan juga masih ada pada jenjang SD/MI anak usia 13 sampai 14 tahun yang masih duduk di bangku SD.
3. Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/MTs sebesar 80.22% dengan rencana target 81,65% berarti capaian kinerja hanya 98,24%, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak usia 13-15 tahun yang tidak tertampung pada jejang SMP/MTs terutama bagi anak-anak daerah terpencil dan daerah tertinggal.
4. Angka Partisipasi Murni tngkat SMA/SMK mencapai 92% dengan target sebesar 94 % hal ini disebabkan jumlah siswa yang tertampung pada SMA/SMK sangat banyak yang berusia 19-20 tahun, bahkan ada beberapa siswa yang sudah berusia 21 tahun. Beberapa faktor penyebab hal tersebut antara lain: murid yang terlambat masuk SD/MI karena tinggal daerah tertinggal, tidak naik kelas, dan rendahnya tingkat perekonomian keluarga.
5. Angka Rata-rata Lama Sekolah dari jenjang SD, SMP dan SMA selama 12 tahun sebesar 7,83 tahun berarti masih ada

siswa/anak yang tidak sekolah, tinggal kelas dan terlambat sekolah sehingga lama sekolah siswa melebihi usia normal pendidikan yaitu 8 sampai 9 bulan.

6. Peningkatan Angka Melek Huruf dilakukan dengan upaya mendorong pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) untuk melakukan kegiatan pendidikan keaksaraan dasar dan keaksaraan fungsional.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan berbagai langkah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan pendidikan secara bertahap yaitu:

- a) Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana PAUD, SD/MI SMP/MTs dan SMA/SMK sehingga daya tampung untuk anak usia 4 sampai 6 tahun lebih besar.
- b) Pemerataan Guru dan peningkatan kualitas guru melalui sertifikasi.

3. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 14 indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis ketiga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
162) Cakupan kunjungan ibu hamil K4	96.09	89.1	94.61
163) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	74.55	38.4	63.90
164) Pertolongan	94.55	89	94.13

persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan			
165) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	73.55	14.8	23.56
166) Cakupan kunjungan bayi	96.18	90.2	93.78
167) Cakupan kelurahan/desa Uci	95.36%	70.8	82.50
168) Cakupan pelayanan anak balita	89.64%	79.6	96.01
169) Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	81.82%	100	122.22
170) Cakupan peserta KB aktif	75.91%	52	72.87
171) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100%	41.31	42.00
172) Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100	100.00
Rata-rata Capaian Kinerja			80.5%

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Pendidikan 2014

Berdasarkan pengukuran dari 13 indikator kinerja, diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 80.5 % atau dikategorikan **Baik**. Tingkat capaian ini, disebabkan oleh realisasi yaitu:

- a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 dengan capaian 89.01% dari yang ditargetkan 94.18%. hal ini belum tercapai secara optimal dikarenakan sasaran ibu hamil yang digunakan

bukan merupakan sasaran yang riil dikarenakan masih banyaknya ibu hamil melakukan pemeriksaan tidak tepat waktu.

- b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dengan capaian 38.04 % dari yang ditargetkan sebesar 60.29%. rendahnya capaian ini disebabkan oleh masih banyaknya ibu hamil yang menggunakan jasa dukun beranak sehingga data yang diperoleh tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
- c. Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan dengan capaian 89% dari yang ditargetkan sebesar 94.55%, rendahnya capaian ini disebabkan sasaran ibu bersalin yang digunakan masih ada yang menggunakan jasa persalinan melalui dukun beranak dan persalinan diluar daerah.
- d. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dengan capaian 14.8 dari yang ditargetkan sebesar 73.55%, hal ini disebabkan pembagi perkiraan komplikasi kebidanan bukan merupakan sasaran yang riil.
- e. Cakupan kunjungan bayi dengan capaian 90.2 dari yang ditargetkan sebesar 96.18%, hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pemeriksaan kesehatan bayi.
- f. Cakupan kelurahan/desa Uci dengan capaian 70.8 dari yang ditargetkan sebesar 95.36%, hal ini disebabkan banyaknya bayi yang tidak datang pada saat posyandu dan masih ada kesalahan pencacatan dan pelaporan JURIM.
- g. Cakupan pelayanan anak balita dengan capaian 79.6 dari target sebesar 89.64%, hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan anak balita serta masih adanya kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

- h. Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan dengan capaian 100% dari yang ditargetkan sebesar 81.82%, hal ini disebabkan penanganan yang serius terhadap penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Singkil.
- i. Cakupan peserta KB aktif dengan capaian 52 % dari yang ditargetkan sebesar 75.91%, hal ini disebabkan masih kurangnya partisipasi dari pasangan usia subur (PUS).
- j. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin dengan capaian 41.31% dari yang ditargetkan 100%, hal ini disebabkan kurang akuratnya data mengenai penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan nasional
- k. Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi dapat memenuhi target capaian 100%, hal ini dapat tercapai karena keseriusan penanganan yang dilakukan seperti: penanganan kasus DBD, Gizi Buruk dan lain-lain.

Dari keseluruhan indikator kinerja pada sasaran “Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat” apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil maka baru indikator kinerja persentase gizi buruk yang mendapat perawatan yang realisasinya melebihi target dan indikator kinerja cakupan kelurahan/desa mengalami KLB jangka menengah sebagaimana terdapat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target kinerja jangka menengah

Indikator Kinerja	Capain Tahun Ini	Target Renstra	Ket.
1) Cakupan kunjungan ibu hamil K4	89.1	96.09	Tidak tercapai
2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	38.4	74.55	Tidak tercapai
3) Pertolongan	89	96.27	Tidak

persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan			tercapai
4) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	14.8	73.55	Tidak tercapai
5) Cakupan kunjungan bayi	90.2	96.82	Tidak tercapai
6) Cakupan kelurahan/desa Uci	70.8	95.36	Tidak tercapai
7) Cakupan pelayanan anak balita	79.6	94.21	Tidak tercapai
8) Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	100	81.82	Tidak tercapai
9) Cakupan peserta KB aktif	52	75.91	Tidak tercapai
10) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	41.31	98.18	Tidak tercapai
11) Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100	100	Tercapai

Sumber: Dinas Kesehatan 2014

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VIII/2008 bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum mencapai target sebagaimana yang terdapat pada peraturan tersebut sehingga Pemerinta Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas KEsehatan telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja diantaranya :

- a) Meningkatkan kapasitas kemampuan petugas kesehatan dalam hal pencacatan laporan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan monitoring serta supervise ke puskesmas-puskesmas
- b) Meningkatkan program imunisasi dengan mengadakan pertemuan, pelatihan dengan JURIM.

4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1.273 Pasien	1.273 Pasien	100 %
2) Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	80 Pasien	70 Pasien	87,5 %
Rata-rata Capaian Kinerja			92,06

Sumber: Laporan Kinerja RSUD 2014

Hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 92.06 % dengan kategori **Baik**. Penjelasan mengenai capain masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator kinerja jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah yang direncanakan sebesar 1.273 Pasien, dapat ditangani sebesar 1.273 dengan persentase 100 %.
2. Indikator Kinerja rata-rata lama kunjungan rawat jalan perhari. 80 Pasien yang direncanakan terealisasi sebesar 70 Pasien.

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi dengan tahun lalu

Indikator Kinerja	Realisasi	
	2013	2014
1) Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1.200 Pasien	1.273 Pasien
2) Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	52 Pasien	70 Pasien

Sumber: Laporan Kinerja RSUD 2014.

Apabila dilihat perbandingan realisasi dengan tahun lalu indikator kinerja mengenai jumlah masyarakat miskin yang dirujuk ke Rumah Sakit sebanyak 1.200 Pasien pada tahun 2013, sedangkan 1.273 pada tahun 2014 hal ini menggambarkan bahwa semakin adanya peningkatan yang sakit di masyarakat Aceh Singkil. Sedangkan Indikator kinerja mengenai Rata-rata kunjungan rawat jalan perhari sebesar 52 Pasien pada tahun 2013 sedangkan pada tahun 2014 mencapai 70 Pasien. Namun apabila dilihat realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah sebagai mana table 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan target tahun ini dengan target Renstra

Indikator Kinerja	Capaian Tahun ini	Capain Renstra	Ket.
1) Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1.273 Pasien	3000 Pasien	Tidak Tercapai
2) Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	70 Pasien	200Pasien	Tidak Tercapai

Sumber : Laporan Kinerja RSUD 2014.

Perbandingan ini memberikan penjelasan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil harus mengembangkan Sarana dan Prasarana RSUD, Puskesmas menjadi pelayanan kesehatan utama dikarenakan tidak unit layanan swasta di Kabupaten Aceh Singkil.

5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya standar Mutu Pelayanan Rujukan, rawat jalan dan dan rawat inap

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kelima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	12 Unit	12 Unit	100
2) jumlah sarana dan prasarana kesehatan	29 Unit	29 Unit	100
Rata-rata Capaian Kinerja			100%

Sumber: Laporan Kinerja RSUD 2014

Dari dua indikator kinerja yang ditetapkan tahun 2014 dalam sasaran ini, rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Baik**. Tingginya capaian ini disebabkan oleh jumlah sarana prasarana kesehatan memenuhi target yang telah ditetapkan.

6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 4 Indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis keenam

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	80 %	80%	100
2) Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	80 %	80%	100

3) Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPD	80 %	80%	100
4) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	10 Jenis	10 Jenis	100
Rata-rata capaian kinerja			100

Sumber: Bappeda 2014

Hasil pengukuran terhadap 4 indikator kinerja diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **Baik**. Pencapaian kinerja ini dipengaruhi karena adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah sehingga pada tahun 2014 dilakukan kegiatan perbaikan dan penyempurnakan perencanaan jangka menengah baik terkait dengan dokumen RPJM, Renstra SKPD, Renja, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama yang difasilitasi oleh BPKP Perwakilan Aceh. Kemudian untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil Pemerintah Aceh Singkil pada awal tahun 2015 Mengadakan Bimbingan Teknis terhadap penyusunan Laporan Kinerja yang dihadiri dan diikuti langsung oleh Bupati Aceh Singkil dengan mengundang narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Pemerintah Daerah dan SKPD;
2. RKPD dan Renja SKPD;
3. Aceh Singkil dalam Angka 2014;
4. Dokumen Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5. Dokumen Database Wisata;
6. RPIJM (Rencana Pembangunan Insfrastruktur Jangka Menengah;
7. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman;
8. Dokumen RTRW
9. Dokumen Memorandum Program Sanitasi;

10. Dokumen PDRB.

7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 3 Indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis ketujuh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	96%	92%	95.83%
2) Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	96%	92%	95.83%
3) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WDP	-
Rata-rata Capaian Kinerja			95.83%

Sumber: Laporan Kinerja DPKKD 2014

Berdasarkan dari hasil pengukuran 3 (tiga) Indikator Kinerja ini diperoleh rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 95,83% atau di kategorikan **Baik**. Baiknya rata-rata capaian ini belum memenuhi rencana kinerja yang telah ditetapkan secara rinci analisis pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

- a) Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah) dengan capaian sebesar 92 % dari 96 % yang ditargetkan hal ini disebabkan belum maksimalnya pemungutan PAD/ PAD belum dapat tercapai secara keseluruhan.
- b) Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD) dengan capaian sebesar 92% dari 96% yang ditargetkan hal ini disebabkan belum maksimalnya penggalan potensi PAD.
- c) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah masih pada WDP sedangkan target pada tahun 2014

memperoleh WTP namun masih adanya kekurangan berupa Inventaris Asset Daerah belum dikelola dengan baik.

Berkenaan dengan capaian kinerja tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan pendataan inventarisasi asset daerah, melakukan pendataan terhadap sumber-sumber PAD daerah, memperbaiki layanan Pajak dan Retribusi Sehingga memiliki gedung pelayanan sendiri dari Kantor DPKKD. Namun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dapat dilihat pada table 3.13 berikut:

Tabel 3.13
Perbandinga realisasi denga tahun lalu
Sasaran Strategis 7 (tujuh)

INDIKATOR KINERJA	REALISASI		Ket.
	2013	2014	
4) Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	90%	92%	Meningkat
5) Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	90%	92%	Meningkat
6) Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	Tetap

Sumber: Laporan Kinerja DPKKD 2014

Perbandingan realisasi dengan tahun lalu memberikan pengjelsan bahwa adanya peningkatan kinerja pada DPKKD khususnya pada indikator kinerja Tingkat Derajat Desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah) dan Jumlah efisiensi pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD).

8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya fasilitas penanganan konflik pertanahan daerah

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 1 Indikator kinerja sebagaimana pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis kedelapan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Fasilitasi konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	4HGU	4 HGU	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setdakab 2014

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis “Meningkatnya penanganan konflik pertanahan” memperoleh persentase capaian sebesar 100 % dengan kategori **baik**.

Pencapaian target ini dipengaruhi oleh tercapainya fasilitasi penangan konflik pertanahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari :

1. Konflik pertanahan PT. Delima Makmur dengan PT Dalanta;
2. Konflik Pertanahan PT. Nafasindo / Ubertraco
3. Konflik Pertanahan Lahan Revitalisasi Perkebunan
4. PT. Delima Makmur dengan Kampong Setuban Makmur dan Tanah Masyarakat.

Dengan adanya penyelesaian konflik ini menjadikan suasana dan roda perekonomian berjalan dengan baik dan apabila dibandingkan dengan tahun lalu maka lebih banyak konflik pertanahan yang harus diselesaikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun lalu

Indikator Kinerja	Realisasi	
	2013	2014
Jumlah Fasilitasi konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	7 Konflik	4 Konflik

Sumber : Bagian Pemerintahan 2014 dan LAKIP Setdakab 2013.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun 2013 dapat dilihat bahwa pada 2013 lebih banyak konflik yang difasilitasi pemerintah daerah dibandingkan dengan konflik ditahun 2014 hal ini menunjukkan adanya perbaikan-perbaikan dalam manajemen pertanahan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil baik konflik pertanahan antara perusahaan maupun masyarakat.

9. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 6 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesepuluh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 SKPD	12 SKPD	100
2) Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	55 %	NA	-
3) Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	3 (Peringkat)	NA	-
4) Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	150 (Rekomendasi)	102	68
5) Cakupan Legislasi Produk Hukum (Ragan, Perbup)	9 Qanun 27 Perbup	8 Qanun 27 Perbu	99,5
6) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus	30 Kasus	100
Rata-rata capaian kinerja			91,87

Sumber : Bagian Organisasi Setdakab, Kantor Perpustakaan dan Inspektorat 2014.

Berdasarkan pengukuran 6 indikator kinerja diperoleh rata-rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 91.87% Atau dikategorikan **Baik**. Penjelasan masing-masing Indikator kinerja yaitu:

1. Indikator Kinerja Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah yang ditargetkan sebanyak 12 SKPD dapat terealisasi keseluruhan. Adapaun dokumen yang dimaksud antara lain dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap SKPK teknis yang penting seperti Bappeda, Setdakab, Dinkes, Dinas Perhubungan dan informatika, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, DPRK, RSUD, Pertanian, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan DPKKD.
2. Indikator Kinerja Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi masih belum dapat diukur dikarenakan belum dilakukan evaluasi oleh tim Menpan dan RB/ BPKP Aceh. Namun menindak lanjuti hasil pemeriksaan atau evaluasi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2013 telah mencapai 39,23 % dengan kategori C sedangkan target pada tahun 2014 menjadi kategori CC.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2013

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2013	2014
2	Persentase pencapaian Sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	39,23%	NA

Sumber : Laporan Evaluasi BPKP Aceh 2013

Berdasarkan capaian tersebut Pemerintah perlu Menindaklanjuti perbaikan Sistem Akuntabilitas kinerja melalui rekomendasi yang disampaikan antara lain:

- a. Untuk Perencanaan Kinerja agar menyajikan IKU dalam dokumen RPJMD dan Renstra, menetapkan tujuan dan sasaran yang berorientasi hasil, menyusun kegiatan atau program yang mendukung tercapainya tujuan/ sasaran menyusun target kinerja yang baik, keselarasan dengan dokumen atasannya serta menjadikan dokumen RPJMD/ Renstra sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan dokumen rencana anggaran serta melakukan review secara berkala terhadap RPJMD/ Renstra;
- b. Untuk Pengukuran Kinerja menyempurnakan untuk mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, melakukan pengukuran dan review secara berkala atas Indikator Kinerja Utama, melakukan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran untuk mengetahui objektivitas hasil relevansi kecukupan dan realisasinya, memanfaatkan IKU dalam menyusun Perencanaan, Penganggaran, Penilaian Kinerja dan Pemantauan Kinerja;
- c. Untuk Pelaporan Kinerja agar memperhatikan lampiran sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lakip harus menyajikan informasi tentang capaian Indikator Kinerja Utama dan Kinerja yang telah diperjanjikan, Lakip memuat perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, memanfaatkan informasi dalam Lakip untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja;
- d. Untuk evaluasi kinerja agar memformalkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja, melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, menindak lanjuti hasil evaluasi program/ Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan

perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, perbaikan kinerja dan mengukur keberhasilan SKPD;

- e. Untuk pencapaian sasaran/ kinerja organisasi agar dilakukan meningkatkan capaian kinerja sasaran yang masih dibawah rata-rata Provinsi Aceh, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Reformasi Birokrasi, mengupayakan aksesibilitas atas Renstra, RKT, PK dan Lakip dan Kebijakan-kebijakan dan aksesibilitas pelayanan secara online. Berdasarkan rekomendasi perbaikan diatas Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 melakukan kegiatan revisi dan asistensi dokumen perencanaan diantaranya RPJMD, Renstra SKPD, IKU, RENJA, dan PK serta pada awal tahun 2015 dilakukan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja sehingga diharapkan Capaian Kinerja dapat meningkat sesuai yang direncanakan.
3. Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD belum terealisasi dikarenakan belum di evaluasi oleh Inspektorat Aceh dan BPKP Aceh. Namun hasil evaluasi LPPD ditingkat Provinsi pada tahun 2013 dapat dilihat pada table 3.18 berikut:

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun 2013

Indikator Kinerja	Realisasi	
	2013	2014
Peringkat prestasi kinerja berdasarkan hasil evaluasi LPPD	Peringkat 6	NA

Sumber : Bagian Pemerirntahan Setdakab Aceh Singkil 2014

Peringkat prestasi kinerja berdasarkan hasil evaluasi LPPD pada tahun 2013 diperoleh peringkat ke 6 dari 23 Kab/Kota Provinsi Aceh Sedangkan untuk tahun 2014 belum diketahui

hasil capaian karena belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Aceh Bersama dengan BPKP, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut :

- a) Tataran pengambilan keputusan terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi rendah dan masih ada 2 IKK yang belum diisi beserta dengan data pendukung;
- b) Tataran pelaksana kebijakan administrasi umum terhadap 215 IKK SKPD dengan prestasi rendah dan terhadap 80 IKK yang tidak diisi agar dapat diisi disertai dengan data pendukung sebagaimana terlampir. Capaian kinerja terhadap 8 urusan wajib (kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesbang dan politik, otonomi daerah dan kearsipan) dan 1 urusan pilihan (perindustrian) dengan prestasi rendah sehingga perlu peningkatan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Upaya meningkatkan peringkat LPPD Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Bagian Pemerintahan mengadakan kegiatan pelatihan dengan mengikutsertakan seluruh SKPK tentang penyusunan LPPD pada tahun 2014 sehingga pencapaian kinerja dapat tercapai sesuai dengan rencana kinerja.

4. Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditarget ditindaklanjuti adalah sebesar 150 rekomendasi dari 222 Jumlah Rekomendasi temuan BPK-RI Provinsi Aceh dan APIP namun yang bisa dilaksanakan adalah sebanyak 102 rekomendasi yang ditindak lanjuti adapun rincian penyelesaian tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Penyelesaian Temuan BPK RI Perwakilan Aceh dan
APIP tahun 2014

No.	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Tindak Lanjut	Sisa Rekomendasi
1	BPK-RI	14	27	27	10
2	BPKP	3	6	-	6
3	Inspektorat Aceh	17	17	-	17
4	Inspektorat Aceh Singkil	157	172	85	87
Jumlah		191	222	102	120

Sumber: Inspektorat Aceh Singkil 2014

5. Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup) Cakupan Legislasi Produk Hukum (Qanun, Perbup, SK Bupati). Dari banyak rancangan qanun yang masuk ke Bagian Hukum dan HAM untuk di legislasi dan telah mencapai target yang direncanakan dengan disahkannya 9 Qanun Kabupaten Aceh Singkil yaitu:
1. Qanun APBK 2014;
 2. Pengundangan Qanun RTRW Tahun 2013
 3. Qanun Perubahan atas Qanun Aceh Singkil tentang Restribusi Olahraga dan Penginapan;
 4. Qanun Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim;
 5. Qanun Pembentukan Perusahaan Daerah Aceh Singkil;
 6. Qanun Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2013;
 7. Qanun Perubahan APBK tahun 2014;
 8. Qanun Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil;
 9. Qanun Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum

Tirta Singkil. Peraturan Bupati yang di legislasi pada tahun 2014 oleh Bagian Hukum dan HAM sebanyak 27 Perbu dan memenuhi target yang direncanakan.

6. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat terealisasi dengan baik dikarenakan Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda sebanyak 15 kasus dan penanganan 15 Kasus di wilayah Pemerintah. Untuk mengetahui capain pemerintah daerah maka perlu dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan realisasi dengan tahun lalu

Indikator Kinerja	Realisasi		Ket
	2013	2014	
1) Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	10 SKPD	12 SKPD	Meningkat
2) Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	39,23	NA	-
3) Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	Peringkat 6	NA	-
4) Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	107	102	Menurun
5) Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	8 Qanun 30 Perbup	8 Qanun 27 Perbu	Meningkat
6) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus	30 Kasus	Tetap

Sumber: Laporan Kinerja Inspektorat, Kantor Arsip dan Bagian Hukum Setdakab 2014.

10. Meningkatnya Legislasi Peraturan Perundang-undangan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 1 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.21 berikut:

Tabel 3.21
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kesebelas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Proleg	10 Proleg	100

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat DPRK 2014

Berdasarkan pengukuran dari 1 (satu) indikator kinerja di peroleh capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori Baik. Tingginya capain ini dipengaruhi oleh indikator kinerja tentang tingkat legislasi peraturan perundang-undangan diperoleh 10 Proses Legislasi Qanun dapat terealisasi keseluruhan antara lain:

1. Qanun APBK 2014;
2. Pengundangan Qanun RTRW Tahun 2013
3. Qanun Perubahan atas Qanun Aceh Singkil tentang Restribusi Olahraga dan Penginapan;
4. Qanun Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim;
5. Qanun Pembentukan Perusahaan Daerah Aceh Singkil;
6. Qanun Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Tahun 2013;
7. Qanun Perubahan APBK tahun 2014;
8. Qanun Hari Jadi Kabupaten Aceh Singkil;
9. Qanun Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 tahun 2010 tentang Tarif Air Minum dan Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Singkil.
10. Qanu Perubahan SOTK Dinas.

11. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 1 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian evaluasi	1 Unit	1 unit	100%

Sumber: Laporan Kinerja BKPP 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 100 % atau di kategorikan **Baik**. Hal ini disebabkan Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian evaluasi dengan target 1 unit tercapai 100% pada tahun 2014. Dengan adanya pembanguan system informasi ini seluruh database masing-masing kepegawaian mulai dari masa pensiun, masa kerja, masa naik pangkat dapat diketahui dengan mudah.

12. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 4 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.23 berikut:

Tabel 3.23
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	35237 KK	32545 KK	92.36%
2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	88607 KK	31449 KK	35.49%
3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	4649 AK	4649 AK	100%
4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	3 KARTU	2 KARTU	66.66%
Rata-rata capaian kinerja			73.62%

Sumber: : Laporan Kinerja Disdukcapil 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 73.62% atau dikategorikan **Cukup**. Rendahnya capain ini disebabkan oleh 4 (empat) indikator kinerja yang realisasinya belum mencapai target yaitu:

1. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga dengan capaian sebesar 32.545 KK dari 35.237 KK yang ditargetkan hal ini disebabkan oleh akses yang sulit bagi masyarakat untuk mengurus KK karena terpusat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kepemilikan kartu keluarga.
2. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk dengan capaian sebesar 31.449 lembar KTP dari 88.607 Lembar KTP yang ditargetkan dikarenakan belum terkirimnya data KTP –Elektronik dari Kemendagri.
3. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran yang ditargetkan 4649 dapat terrealisasi dengan baik.
4. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian dengan capaian sebesar 3 Kartu dari 2 Kartu yang ditargetkan hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat atas kegunaan akta kematian.

Untuk mengetahui capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk mencapai jangka panjang maka perlu adanya perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu sebagaimana table 3.24 berikut:

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini
dengan Realisasi Kinerja Tahun lalu

Indikator Kinerja	Realisasi		Ket
	2013	2014	
1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	87,25%	92.36%	Naik
2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	30,35%	35.49%	Naik
3) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	98%	100%	Naik
4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	60.15%	66,66%	Naik

Sumber: Laporan Kinerja Disdukcapil 2014.

Dari perbandingan yang diperoleh diketahui bahwa terjadinya kenaikan terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

13. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya pembinaan desa/kampung.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keempat Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Kampung yang dibina	10 Desa	2 Desa	20
2) Jumlah Kampung yang dinilai	11 Desa	11 Desa	100
Rata-rata capaian kinerja			60

Sumber: Laporan Kinerja BPM 2014

Berdasarkan pengukuran dari 2 (dua) indicator kinerja diatas diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 60 % atau dikategorikan Cukup. Rendahnya tingkat capaian ini disebabkan oleh 2 (dua) indicator kinerja yang realisasinya belum mencapai target yaitu:

1. Indikator kinerja jumlah kampung yang dibina dalam hal administrasi perdesaan yang ditargetkan sebanyak 10 (sepuluh desa) hanya dapat terealisasi sebesar 2 (dua) Desa yaitu Desa Lipat Kajang Bawah dan Desa Singkohor.
2. Jumlah Kampung yang dinilai dalam hal lomba antar kampung dengan memilih sebanyak 11 Desa dari 120 Desa di Kabupaten Aceh Singkil yaitu; Desa Sumber Mukti, Desa Mukti Jaya, Desa Lae Nipe, Desa Suka Jaya, Desa Suka Makmur, Desa Tulak Ambun, Desa Biskang, Desa Bukit Harapan, Desa Ketapang Indah, Desa Lae Bangun dan Desa Pulau Balai dapat direalisasikan dan mengikuti perlombaan dengan baik.

14. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 1 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.26 berikut:

Tabel 3.26
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kelima Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	3 Tropy	3 Tropy	100 %

Sumber : Laporan Kinerja Disbudparpora 2014

Berdasarkan pengukuran dari 1 (satu) Indikator Kinerja diperoleh capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori **Baik**. Capaian ini dipengaruhi oleh mendapat mendali emas pada cabang olahraga takraw dan tarung derajat (POPDA) dan juara 4 Sepak Bola pada piala Danone.

15. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.27 berikut:

Tabel 3.27
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Keenam Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Pembinaan partai politik	15 Parpol	15 Parpol	100
2) Jumlah Organisasi dan LSM yang terinventarisir	44 LSM	44 LSM	100
Rata-rata capaian kinerja			

Sumber : Laporan Kinerja Kesbangpol 2014

Berdasarkan pengukuran dari 2 (dua) indikator kinerja diatas diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar 100 % atau dikategorikan Baik. Tingginya tingkat capaian ini disebabkan oleh 2 (dua) indikator kinerja yang realisasi dapat mencapai target yaitu:

Indikator kinerja Jumlah Pembinaan partai politik yang ditargetkan dihadiri sebanyak 15 Partai Politik Baik Partai Nasional maupun partai lokal dalam hal Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA, sera adanya dana bantuan yang diberikan untuk setiap partai politik sebagai upaya pengembangan kegiatan Partai Politik di Kabupaten Aceh Singkil;

Indikator Jumlah Organisasi dan LSM yang terinventarisir sebanyak 44 LSM yang ditargetkan dapat teralisasi dengan baik, namun pada kegiatan yang akan datang lebih. Pencapaian indikator ini tentu sangat penting agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kegiatan yang merugikan pemerintah dan masyarakat yang mengatas namakan suatu organisasi.

16. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 1 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.28 berikut:

Tabel 3.28
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketujuh Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Izin yang diterbitkan	1620 Izin	1334 Izin	82.3

Sumber: KP2TSP 2014

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja diperoleh capaian kinerja sebesar 82,3 % dengan kategori **Baik**. Penjelasan mengenai capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator kinerja jumlah izin yang diterbitkan terdiri dari berbagai jenis izin diantaranya izin gangguan, Izin IMB, Izin Perikanan, Izin Trayek, dan Penerbitan Izin Umum yang secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.29
Rincian Capaian Indikator Kinerja Penerbitan Izin
Tahun 2014

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
Jumlah Izin yang diterbitkan:			
1. Izin HO	227	277	100%
2. Izin IMB	40	31	77,5%
3. Izin Perikanan	6	2	33,3%
4. Izin Trayek	2	NA	NA
5. Izin Umum	1295	1024	79%

Sumber: Laporan Kinerja KP2TSP

Tabel ini menunjukkan bahwa indikator kinerja terdapat pencapaian jumlah izin yang diterbitkan masih belum memenuhi target dikarenakan masih banyaknya usaha masyarakat belum sadar akan kewajiban untuk menguru dokumen IMB, masih banyaknya masyarakat nelayan yang menggunakan kapal-kapal tradisional, izin trayek yang mencapai nihil dikarenakan belum ada perusahaan yang mengurus izin tersebut serta

masih kurangnya sosialisasi kepala pelaku usaha /masyarakat dikecamatan-kecamatan serta belum adanya sanksi yang diberikan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar sadar terhadap kewajiban pengurusan segala bentuk izin melalui Radio dan spanduk-spanduk.

17. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Produktivitas pertanian dan Pembinaan Lembaga petani.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 4 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.30 berikut:

Tabel 3.30
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedelapan Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tingkat produksi komoditi :			
a. Padi	3231 Ton	3234 Ton	100
b. Jagung	200 Ton	192 Ton	96
c. Palawijaya	1000 Ton	862,90 Ton	86,2
2) Luas Lahan Tanam	1098Ha	1065,6 Ha	96,9

Sumber: BPS, Dinas Pertanian dan BPPKP 2014

Berdasarkan pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata capaian sebesar 94,77% dengan kategori **baik**. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja tingkat produksi komoditi padi, jagung dan palawijaya dapat dikatakan telah berjalan dengan baik meskipun belum mencapai target secara keseluruhan. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan penopang perekonomian Aceh Singkil. Pada tahun 2014, share sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Aceh Singkil sebesar 34,29 persen. Salah satu subsektor pertanian adalah tanaman pangan. Subsektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Luas panen padi tahun

2014 adalah 1.098 hektar. Pada tahun 2014, produksi padi di Aceh Singkil sebesar 3.234 ton, dan jagung sebesar 192 ton. Sektor Pertanian Tanaman Pangan merupakan sektor yang cukup berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan. Luas areal persawahan yang tersedia sebanyak 1.065,6 Ha. Dari total luas areal sawah, yang terluas terdapat dikecamatan Suro seluas 318,3 Ha dan yang terkecil adalah di kecamatan Pulau Banyak yaitu seluas 8,6 Ha. Dalam upaya menunjang produksi pertanian khususnya persawahan membutuhkan sarana irigasi sebagai sumber pangairan

18. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dan kesehatan hewa dalam rangka pencapaian swasembada daging.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.31 berikut:

Tabel 3.31
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Kesembilan Belas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	6.3 %	4.5 %	71.4
2) Angka Kesakitan Hewan	2 %	1 %	50
Rata-rata capaian kinerja			60,7

Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan 2014

Berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) Indikator Kinerja diperoleh capaian kinerja sebesar 60.7% dengan kategori Cukup. Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Persentase peningkatan ketersediaan hewan ternak pertahun ini dipengaruhi oleh populasi ternak yang ada di Kabupaten Aceh Singkil seperti Kerbau, Sapi, Kambing, Domba dan Populasi Unggas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.32
Rincian Populasi Ternak Tahun 2014

No.	Populasi Ternak	Target	Realisasi	%
1	Kerbau dan Sapi	2.7	1.3	48.15
2	Kambing/Domba	1.5	1.3	86.67
3	Ternak Unggas	2	1.9	95

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capain terhadap peningkatan populasi ternak masih belum mencapai target sebagaimana yang direncanakan hal ini dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan sehingga sering muncul penyakit Septicaemia Epizootika (SE) yang menyerang ternak kerbau dan sapi merupakan penyakit menular. Selain dari segi manajemen masyarakat masih belum mempunyai kesadaran untuk memelihara ternaknya dengan baik karena system pemeliharaan hewan ternak masih bersifat tradisional dengan kata lain ternak mencari sendiri makanannya adapun usaha yang telah dilakukan melalui vaksinasi SE serta pengobatan ternak masyarakat belum memadai.

- b. Indikator angka kesehatan hewan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2 %. Realisasi capaian indikator ini hanya mencapai 1 % dengan persentase 50 % hal ini disebabkan terjadinya wabah penyakit SE pada tahun 2014 pada ternak besar sehingga menyebabkan tingginya angka kematian serta lambatnya informasi yang diperoleh terhadap penyakit hewan sehingga masyarakat baru melaporkan apabila ternak telah mati dalam jumlah yang besar. Untuk mengetahui perkembangan realisasi kinerja maka perlu dilihat pada tabel 3.33 Perbandingan berikut:

Tabel 3.33
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2013 dan 2014 Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan

Indikator Kinerja	% Capaian		Bertambah/ Berkurang % Capain
	2013	2014	
3) Persentase Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	100	71.4	Berkurang
4) Angka Kesakitan Hewan	50	50	Tetap

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2014

Perbandingan realisasi kinerja ni diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan persentase capain indikator kinerja peningkatan populasi ternak pada tahun 2014 karena disebabkan mewabahnya penyakit SE sehingga menyebabkan kematian. Pembangunan usaha peternakan mempunyai peranan strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan dengan mengupayakan peningkatan produksi peternakan, hal ini didukung oleh kondisi geografis yang memiliki daerah dataran tinggi dan ketersediaan hijauan makanan ternak yang memadai. Populasi ternak yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yaitu ternak sapi potong, ternak kerbau, ternak kambing, ternak domba, ternak ayam buras (kampung), ternak ayam pedaging, dan ternak itik. Sementara itu ternak sapi perah dan kuda masih belum ada.

Pada tahun 2013 populasi ternak besar mencapai mencapai 4.269 ekor yang terdiri dari ternak sapi potong 3.576 ekor dan ternak kerbau 693 ekor. Persebaran sapi potong terbanyak pada Kecamatan Gunung Meriah dengan populasi 1.285 ekor. Sedangkan Persebaran ternak sapi potong yang paling sedikit berada di Kecamatan Pulau Banyak Barat dimana tidak ada seekorpun sapi potong di sana. Sedikitnya ternak sapi yang ada di Kecamatan Pulau Banyak Barat disebabkan kondisi geografis yang kurang mendukung karena merupakan daerah kepulauan sehingga luas ladang penggembalaan tidak mencukupi. Dengan semakin banyaknya ternak sapi di Kabupaten Aceh Singkil, akan memberikan dampak yang

positif bagi masyarakat. Karena dengan semakin banyak peternakan sapi maka harga daging sapi akan semakin rendah, sehingga masyarakat kelas menengah kebawah bisa memenuhi kebutuhan proteinnya dan tentunya hal ini dapat menambah pendapatan keluarga.

19. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 3 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.34
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah luas reboisasi hutan dan penghijauan lahan	5 Ha	2 Ha	40
2) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	194 Ha	50 Ha	25,77
3) Luas kerusakan kawasan hutan	79.5 Ha	78 Ha	1.01
Rata-rata Capaian Kinerja			

Sumber : Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2014

20. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya produksi Perkebunan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tingkat produksi komoditi :			
a. Sawit	155 Ton	142 Ton	91.6 %
b. Karet	15.5 %	12.5%	80.6% (86%)
2) Luas Lahan Tanam	46.5 Ha	45 Ha	96.77%
Rata-rata Capaian Kinerja			91.43%

Sumber: Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 90,34 % atau dikategorikan **Baik**. Selain Sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan juga merupakan sektor sangat berpotensi untuk dikembangkan. Komoditas andalan dalam sektor pertanian berasal dari komoditas di subsektor perkebunan, kelapa sawit hasil perkebunan rakyat dan swasta memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian di Aceh Singkil. Pada tahun 2013 produktivitas hasil kelapa sawit sebesar 12,73 ton/ha. Tingkat Produksi komoditi sawit dan karet mencapai realisasi 86%, serta luas lahan tanam mencapai 96.77% dari target 100 %. Hal ini disebabkan masih terkedala mengenai ketersediaan pupuk bagi masyarakat sehingga mempengaruhi hasil produksi serta kurang optimalnya pengelolaan perkebunan kelapa sawit oleh masyarakat.

21. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya produksi Perikanan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 3 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Satu

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	11.528 Ton	11.200 Ton	97,15%
2) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	32 Ton	28 Ton	87,50%
3) Jumlah sarana dan Prasarana perikanan	22 Unit	19 Unit	86,36%
Rata- Rata Capaian Kinerja			90,34%

Sumber: *Dinas Perikanan dan Kelautan 2014*

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 90,34 % atau dikategorikan **Baik**. Hal ini disebabkan oleh dari 3 (tiga) Indikator kinerja seluruhnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, karena kurangnya anggaran dari yang direncanakan.

22. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya pembinaan Koperasi.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 2 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Dua

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Koperasi yang aktif	87 koperasi	87 koperasi	100%
2) Jumlah Koperasi yang sehat	20 Koperasi	15 Koperasi	75%
Rata-rata capaian kinerja			87.5%

Sumber: Disperindagkop dan UKM 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 87.5% atau dikategorikan **Baik**. Jumlah peningkatan Koperasi yang aktif pada tahun 2014 adalah 87 koperasi dari target 87 koperasi. Sedangkan Koperasi yang sehat dengan target 20 Koperasi tercapai 15 Koperasi yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 target koperasi aktif dapat terlaksana dengan baik.

23. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya pembinaan UKM.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan 1 Indikator Kinerja sebagaimana pada tabel 3.38 berikut:

Tabel 3.38
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Tiga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase UMKK yang mengembalikan dana bergulir	14 %	7,2%	72%

Sumber: Disperindagkop dan UKM 2014

Persentase UMKM yang mengembalikan dana bergulir dengan capaian sebesar 7,2% dari 10% yang ditargetkan atau dengan persentase capaian sebesar 72%. Hal ini disebabkan :Masih kurangnya kesadaran peminjam dana bergulir untuk

mengembalikan pinjamannya, karena adanya persepsi sebagian dimasyarakat bahwa dana bergulir tersebut adalah hibah dari Pemerintah daerah. Adapun jumlah pengembalian dana bergulir pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 321,039,253,- dari total dana yang digulirkan sebanyak Rp. 4,434,000,000,-

Untuk mengatasi kegagalan tersebut diatas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan lebih intensif ke IMKM, serta berperan aktif mencarikan peluang pasar melalui media onlie atau mencari peluang kerjasama dengan daerah lain.
2. Memperbesar dana pembinaan koperasi dan menambah personil dibidang koperasi.
3. Membentuk tim pokja pemantauan, pengendalian dan evaluasi Dana bergulir

24. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terakomodirnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat dan laut

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada table 3.39 berikut.

Tabel 3.39
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Empat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40 %	40 %	100
2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	33.33 %	33.33 %	100
3) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	33 %	33 %	100
4) Tersedianya unit penguji kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	25 %	20 %	80
Rata-rata capaian			95%

Sumber Dinas Perhubungan dan Informatika 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 95% % atau dikategorikan **Baik**.

Hasil penghitungan ini menunjukkan bahwa masyarakat pengguna jasa transportasi darat dan laut dapat terakomodir dengan baik.

25. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Optimalisasi Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.40 berikut:

Tabel 3.40
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Lima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pad Kabupaten Kota yang telah memliki terminal	75%	50%	66.66
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	80%	80
Rata-rata capaian kinerja			48.8

Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 48.8 % atau dikategorikan **Kurang**. Hal ini menunjukkan bahwan Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten belum terlaksana dengan baik. Ini disebabkan Ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas

dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebarangan dalam kabupaten/kota belum terlaksana pada tahun 2014 dan akan menjadi target yang harus dicapai secara maksimal di tahun 2017.

26. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.41 berikut:

Tabel 3.41
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Enam

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	40 Ha	40 Ha	100
2) Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	7 Km	5 Km	71,43
3) Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	10 Km	7 Km	70,00
4) Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	10 Km	7 Km	70,00
5) Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	35 Km/Jam	30 Km/Jam	85,71
6) Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	1500 Jiwa	1000 Jiwa	66,67
7) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	30 Unit	23 Unit	76,67
8) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	1331 M	1250	93,91
Rata-rata Capaian Kinerja			79.29

Sumber: Dinas PU 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 48.8 % atau dikategorikan **Cukup**.

27. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.42 berikut:

Tabel 3.42
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Tujuh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Cakupan ketersediaan rumah layak huni	140 Unit	158 Unit	112,86
2) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	1180 KK	1180 KK	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja			106%

Sumber : Dinas PU 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 106 % atau dikategorikan **Sangat Baik**.

28. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.43 berikut:

Tabel 3.43
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Delapan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 Desa	10 Desa	50%
Rata-rata Capaian Kinerja			50%

Sumber: Dinas PU 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 50 % atau dikategorikan **Kurang**.

29. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.44 berikut:

Tabel 3.44
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua Puluh Sembilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah pelestarian situs resmi daerah	1 Unit	1 Unit	100%

Sumber : Disbudparpora 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100 % atau dikategorikan **Baik**. Jumlah Pelestarian situs resmi daerah yang dimaksud meliputi: Makam Syech Hamzah Fansuri.

30. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Pengurangan resiko bencana

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.45 berikut:

Tabel 3.45
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	90 %	75%	83.33

Sumber : BPBD 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 83,33 % atau dikategorikan **Baik**. Pencegahan dini dan penanggulangan bencana

yang dimaksud meliputi: kesiapsiagaan kebutuhan pokok, peralatan dan sumber daya manusia.

31. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.46 berikut:

Tabel 3.46
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Pulu Satu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah objek wisata	7 Lokasi	5 Lokasi	71.42%
2) Jumlah wisatawan ke objek wisata :			
a. Wisatawan dalam Negeri	a. 20.000	a. 15.000	75%
b. Wisatawan luar Negeri	b. 5.000	b. 48 0	9.6% (42.3%)
Rata-rata Capaian Kinerja			56.86%

Sumber: Disbudparpora 2013

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 56.86% atau dikategorikan **Cukup**. Hal tersebut dikarenakan jumlah objek wisata yang ditargetkan 7 Lokasi hanya terealisasi sebanyak 5 Lokasi.

32. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.47 berikut:

Tabel 3.47
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Pulu Dua

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Cakupan Kajian Seni	50%	10 %	20%
2) Cakupan Fasilitasi Seni	30%	5 %	16,67%
3) Cakupan Gelar Seni	75%	15 %	20%
4) Misi Kesenian	100%	100 %	100%

5) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	25%	5 %	20%
6) Cakupan Tempat	100 %	100 %	100%
7) Cakupan Organisasi Bidang Kesenian	34%	17,65 %	51,91%
Rata – Rata Capaian Kinerja			46,94%

Sumber: Disbudparpora 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 46.94% atau dikategorikan **Kurang**. Hal tersebut dikarenakan dari 7 Indikator Kinerja yang ditargetkan 100% hanya 2 indikator kinerja yang terealisasi sebesar 100%.

33. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis :Meningkatkan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana taman kota dalam rangka mengurangi pemanasan global.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.48 berikut:

Tabel 3.48
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Tiga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	3500 Bibit Tanaman	3325 Bibit Tanaman	95%

Sumber: Bapedalda 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 95% atau dikategorikan **Baik**. Hal ini dikarenakan realisasi 2 (dua) dari 3 (tiga) indikator sasaran belum terlaksana. Adapun satu indikator yang terlaksana adalah: Peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama dengan capaian sebesar 3.325 Bibit Tanaman dari 3.500 Bibit Tanaman yang ditargetkan dengan persentase 95%. Hal ini disebabkan pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi kenaikan harga bibit tanaman.

34. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.49 berikut:

Tabel 3.49
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Empat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah peralatan laboratorium lingkungan	4 Unit	3 Unit	75%
2) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	1 Industri	1 Industri	100%
3) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	1 Industri	1 Industri	100%
4) Peningkatan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	2 Industri	2 Industri	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			93.75%

Sumber: Bapedalda 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 93.75% atau dikategorikan **Baik**. Capaian target setiap indikator pada sasaran ini terlaksana dengan baik, 3 (tiga) dari 4 (empat) indikator masing-masing mencapai angka realisasi 100 %. 1 (satu) indikator yang mencapai angka 75% yaitu Jumlah peralatan laboratorium lingkungan dengan capaian sebesar 3 Unit dari 4 Unit yang ditrgetkan dengan persentase 75%. Hal ini disebabkan oleh 1 Unit Alat Laboratrium tidak direalisasikan karena terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan.

35. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Danau, Sungai dan Laut terhadap pencemaran oleh limbah domestik.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.50 berikut:

Tabel 3.50

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Lima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Danau	7 Titik	6 Titik	85,71%
2) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Sungai	5 Titik	3 Titik	60%
3) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Laut	7 Titik	6 Titik	85,71%
Rata - Rata Capaian Kinerja			77,14

Sumber: Bapedalda 2014

Berdasarkan pengukuran dari tiga indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 77.14% atau dikategorikan **Baik**. Capaian target setiap indikator pada sasaran ini kurang maksimal, sebab 3 (tiga) indikator masing-masing mencapai angka realisasi dibawah target 100 %. 1 (satu) indikator yang mencapai angka 85,71% yaitu Jumlah titik pemantauan Air danau dengan capaian sebesar 6 Titik dari 7 Titik yang ditargetkan, 1 (satu) indikator yang mencapai angka 60,00% yaitu Jumlah titik pemantauan Air Sungai dengan capaian sebesar 3 Titik dari 5 Titik yang ditargetkan, 1 (satu) indikator yang mencapai angka 85,71% yaitu Jumlah titik pemantauan Air Laut dengan capaian sebesar 6 Titik dari 7 Titik yang ditargetkan.

36. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.51 berikut:

Tabel 3.51

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Enam

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah alat pemantau curah hujan, suhu dan kelembaban udara	11 Alat	3 Alat	27.3%
2) Cakupan wilayah yang terpantau curah hujan, suhu dan kelembabannya	11 Wilayah	3 Wilayah	27.3%
3) Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan	1 Laporan	1 Laporan	100%
Rata-rata Capaian Kinerja			51.53%

Sumber: Bapedalda 2014

Berdasarkan pengukuran dari tiga indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 51.53% atau dikategorikan **Kurang**. Hal ini disebabkan minimnya pembiayaan upaya peningkatan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam.

37. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.49 berikut:

Tabel 3.52

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Tujuh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	57 % (1.456 Orang)	57 % (1.456 Orang)	100%
2) Cakupan Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma (Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosial)	24 % (200 Orang)	24 % (200 Orang)	100%
Rata-rata capaian kinerja			100%

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari satu indikator kinerja maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa PMKS yang memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar memenuhi target capaian kinerja 100% dengan rincian :

- Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS lainnya yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 57 % dan target individu penerima bantuan sebanyak 1.456 orang dapat terlaksana pada tahun 2014.
- Cakupan pembinaan para penyandang cacat dan trauma (persentase (%)) penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial mencapai 24% dengan target pembinaan sebanyak 200 orang dapat terlaksana pada tahun 2014.

38. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.53 berikut:

Tabel 3.53
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Delapan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial	100%	57%	57%

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 57% atau dikategorikan **Cukup**. PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial adalah 1456 orang, meliputi: 15 alat bengkel, 6 tukang pangkas, 320 orang anak yatim, 1115 orang kaum dhuafa.

39. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Mengevakuasi Korban Bencana Alam.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.54 berikut:

Tabel 3.54
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Tiga Puluh Sembilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	20 % (2.188 KK/Kepala Keluarga)	20 % (2.188 KK/Kepala Keluarga)	100%

Sumber : BPBD 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **baik**. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat meliputi: 2188 KK dapat tercapai sesuai dengan target realisasi 2014 .

40. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.55 berikut:

Tabel 3.55
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosia	24 % (200 Orang)	24 % (200 Orang)	100%
2) Persentase (%) Lanjut	18 %	18 %	100%

Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	175 Orang	175 Orang	
Rata-rata Capaian Kinerja			100%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **baik**. Penyandang Cacat Fisik dan Mental yang telah Menerima Jaminan Sosial meliputi 200 orang, sesuai dengan target tahun 2014. dan jumlah lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial meliputi 175 orang, sesuai dengan target capaian kinerja 2014.

41. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.56 berikut:

Tabel 3.56

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Satu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	75 %	70%	93.33
2) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	60 %	50%	83.33
3) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	60 %	50%	83.33%
Rata-rata capaian kinerja			86.66%

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 86.66% atau dikategorikan **baik**. Hal ini disebabkan karena Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi terealisasi 70% dengan target 75%, realisasi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mencapai

50% dari target 60% dan realisasi besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan mencapai 50% dari target 60%.

42. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.57 berikut:

Tabel 3.57

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Dua

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	70 %	60%	85.71%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 86.66% atau dikategorikan **baik**. Hal ini dikarenakan target besaran pencari tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan mencapai 60% dengan target 70%.

43. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.58 berikut:

Tabel 3.58

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Tiga

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %	50 %	100%
2) Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	50 %	50 %	100%
Rata-rata capaian kinerja			100%

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **Baik**. Hal ini disebabkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek masing-masing dengan target 50%, terealisasi 50%.

44. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Perekonomian dan Keterampilan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.59 berikut:

Tabel 3.59

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Empat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Tingkat Perekonomian Warga Transmigrasi	3 UPT	2 UPT	66.67%
2) Tingkat Keterampilan Warga Transmigrasi	3 UPT	2 UPT	66.67%
<i>Rata-rata Capaian Kinerja</i>			66.67%

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **Cukup**. Hal ini disebabkan tingkat perekonomian warga transmigrasi dan tingkat keterampilan warga transmigrasi masing-masing dengan target 3 UPT terealisasi 2 UPT.

45. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.60 berikut:

Tabel 3.60
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Lima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Indeks Keluarga Sejahtera	12.2 %	11.5%	94.26%
2) Prevalensi peserta KB aktif	10.4 %	9.85%	92.71%
3) Jumlah Alat Kontrasepsi KB	44000 Set	5796 Set	13.17%
Rata-rata capaian kinerja			66.71%

Sumber: BPPKS 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 66.71% atau dikategorikan **Cukup**. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dengan rincian: target Indeks Keluarga Sejahtera 12.2 % terealisasi 11.5%, target Prevalensi peserta KB aktif 10.4% terealisasi 9.85%, dan target jumlah alat kontrasepsi KB 44000 set, terealisasi 5796 Set.

46. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan bagi PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.61 berikut:

Tabel 3.61
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Enam

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Persentase peningkatan KIE KB / KS	15%	11%	73,33%
2) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	11222	238	2.12%
Rata-rata capaian kinerja			37.72%

Sumber : BPPKS 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 37.72% atau dikategorikan **Kurang**. Hal ini disebabkan kurangnya pembiayaan pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dengan rincian : Persentase peningkatan KIE KB / KS dengan target 15%, terealisasi 11% dan Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun dengan target 11222 set, terealisasi 238 set.

47. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Terwujudnya Pelayanan KIE KB - KS bagi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.62 berikut:

Tabel 3.62
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Tujuh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB – Aktif	10200 Orang	9847 orang	67.12%
2) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	6000 Orang	5766 orang	96.1%
3) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	1150 Orang	971 Orang	0.008%
4) Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber – KB	170 Orang	157 Orang	92.35%
Rata-rata capaian kinerja			63.89%

Sumber: BPPKS 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 63.89% atau dikategorikan **Cukup**. Hal ini disebabkan Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB – Aktif dengan target 10200 orang, terealisasi 9847 orang, Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*) dengan target 6000 orang, terealisasi 5766 orang, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB dengan target 1150 orang

terrealisasi 971 orang dan Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber – KB dengan target 170 orang terealisasi 157 orang.

48. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan pembinaan KB - KS bagi peserta KB Aktif Pria dan Wanita melalui PPKB yang tersebar di setiap desa / kelurahan

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.63 berikut:

Tabel 3.63
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Delapan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB / PKB) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan	13 Orang	13 Orang	100 %
2) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas d setiap desa / kelurahan	120 Orang	22 Orang	18.33%
3) Jumlah kelompok pembinaan	20 Kelompok	15 Kelompok	75%
4) Jumlah Petugas KB	60 Orang	10 Orang	16.66%
Rata-rata capaian kinerja			52.49%

Sumber: BPPKS 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 52.49% atau dikategorikan **Kurang**. Hal ini disebabkan Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan dengan target 13 Orang terealisasi 100%, Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 petugas d setiap desa/kelurahan dengan target 120 Orang terealisasi 22 orang, Jumlah kelompok pembinaan dengan target 20 Kelompok terealisasi 15 Kelompok dan Jumlah Petugas KB dengan target 60 orang terealisasi 10 orang.

49. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.64 berikut:

Tabel 3.64
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Empat Puluh Sembilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah (unit) MUPEN dan MUYAN	2 Unit	2 Unit	100%
2) Peningkatan Jumlah KRR	21 Kelompok	21 Kelompok	100%
Rata-rata capaian kinerja			100%

Sumber: BPPKS 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **Baik**. Hal ini disebabkan Jumlah (unit) MUPEN dan MUYAN dengan target 2 Unit dan Peningkatan Jumlah KRR dengan target 21 Kelompok masing-masing terealisasi 100%.

50. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatkan Fasilitas Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.65 berikut:

Tabel 3.65
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Lima Puluh

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan	13 Plkb	13 Plkb	100%
2) Persentase Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU	22 Kelompok	22 Kelompok	100%
Rata-rata capaian kinerja			100%

Sumber: BPPKS 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 100% atau dikategorikan **Baik**. Hal ini disebabkan Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan dengan target 13 Plkb dan Persentase Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – PADU dengan target 22 Kelompok masing-masing terealisasi 100%.

51. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengukur sasaran strategis ini ditetapkan satu indikator kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 3.66 berikut:

Tabel 3.66
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Lima Puluh Satu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1) Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	25 Kali	15 Kali	60%
2) Berfungsinya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam	20 Unit	18 Unit	90 %
3) Berfungsinya Sarana dan Prasarana Peribadatan	13 Unit	13 Unit	100%
4) Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)	20 Kasus	10 Kasus	50%
Rata-rata capaian kinerja			75%

Sumber : Dinas Syariat Islam 2014

Berdasarkan pengukuran dari indikator kinerja diatas maka diperoleh persentasi tingkat capaian sebesar 75% atau dikategorikan **Baik**. Hal ini disebabkan Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat dengan target 25 kali terealisasi 15 Kali, Berfungsinya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam dengan target 20 Unit terealisasi 18

Unit, Berfungsinya Sarana dan Prasarana Peribadatan dengan target 13 Unit terealisasi 100% dan Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan dengan target 20 Kasus terealisasi 10 Kasus.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pencapaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2014 menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp.. **239,016,503,499** (setelah perubahan anggaran) Target dan realisasi atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dapat dijabarkan dalam tabel 3.67 di bawah ini:

Tabel 3.67
Tingkat Capaian Kinerja Keuangan berdasarkan
Program Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Singkil Tahun 2014

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9,438,775,587	9,312,489,207	98.66%
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	19,726,602,217	18,937,096,768	96.00%
3	Program Pendidikan Menengah	9,333,252,777	8,563,122,024	91.75%
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	5,097,930,285	5,096,338,950	99.97%
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	383,530,200	523,230,200	136.42%
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,789,879,553	1,287,969,820	71.96%
7	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1,841,300,152	1,838,005,152	99.82%
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	351,167,491	286,674,991	81.63%
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	932,521,844	923,791,844	99.06%
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	21,658,300	20,833,300	96.19%
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	930,469,000	915,329,000	98.37%
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	238,064,894	201,993,894	84.85%
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	7,013,725,258	6,850,503,000	97.67%

LAPORAN KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 2014

14	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	12,230,200,000	10,083,332,892	82.45%
15	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	5,866,100,200	5,363,681,200	91.44%
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	641,621,645	579,821,645	90.37%
17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	122,245,000	55,447,500	45.36%
18	Program Perencanaan Pengembangan Wisata Budaya	88,880,000	88,600,000	99.68%
19	Program Lingkungan Sehat Perumahan	57,330,000	57,330,000	100.00%
20	Program Pemanfaatan Tata Ruang	76,850,000	76,850,000	100.00%
21	Program Pengembangan Data / Informasi	205,495,000	205,445,000	99.98%
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	171,415,000	171,415,000	100.00%
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4,462,733,600	3,862,374,100	86.55%
24	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	94,965,000	89,266,000	94.00%
25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	432,069,000	429,569,000	99.42%
26	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	100,851,500	100,701,500	99.85%
27	Program Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD	79,945,000	79,945,000	100.00%
28	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	506,769,400	504,951,000	99.64%
29	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	590,582,000	578,878,000	98.02%
30	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	674,515,000	645,710,000	95.73%
31	Program Peningkatan Perbaikan Dokumen/Arsip Daerah	20,000,000	20,000,000	100.00%
32	Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian	74,228,924	72,703,924	97.95%
33	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	806,862,500	806,862,500	100.00%
34	Program penataan Administrasi Kependudukan	634,000,000	634,000,000	100.00%
35	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	92,983,500	92,983,500	100.00%
36	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	369,109,000	369,064,000	99.99%
37	Program Pengelolaan Keragaman budaya	475,484,000	468,034,000	98.43%
38	Program Pembinaan dan Permasalahatan Olah Raga	1,041,800,000	1,036,100,000	99.45%

LAPORAN KINERJA KABUPATEN ACEH SINGKIL 2014

39	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	2,033,042,800	2,032,103,740	99.95%
40	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	228,715,000	228,115,000	99.74%
41	Program pendidikan politik masyarakat	156,702,510	156,702,510	100.00%
42	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	244,062,120	244,062,120	100.00%
43	Program Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	190,000,000	189,000,000	99.47%
44	Program peningkatan Kesejahteraan Petani	628,753,000	628,653,000	99.98%
45	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	171,400,000	171,400,000	100.00%
46	Program Peningkatan Produksi Pertanian	3,892,244,050	3,890,791,650	99.96%
47	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	145,445,000	145,445,000	100.00%
48	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	4,129,905,700	4,129,177,998	99.98%
49	Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan	127,300,000	127,300,000	100.00%
50	Program rehabilitasi Hutan & Lahan	1,275,750,220	1,267,367,470	99.34%
51	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	502,537,326	492,488,326	98.00%
52	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3,397,751,334	3,396,844,125	99.97%
53	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	833,033,950	826,843,950	99.26%
54	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	406,352,070	405,102,070	99.69%
55	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	226,971,750	205,851,750	90.69%
56	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	482,300,000	441,254,000	91.49%
57	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5,383,808,000	5,357,168,750	99.51%
58	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1,550,000,000	1,525,035,000	98.39%
59	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	35,000,000	35,000,000	100.00%
60	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	78,533,335	78,533,250	100.00%
61	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	543,776,000	543,536,000	99.96%
62	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	18,785,180,425	15,709,478,932	83.63%
63	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	490,230,000	489,150,000	99.78%
64	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	53,210,892,828	28,124,374,471	52.85%
65	Program Lingkungan Sehat Perumahan	794,735,000	739,195,000	93.01%
66	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1,335,947,857	1,335,947,000	100.00%
67	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan	11,268,845,250	10,348,426,017	91.83%

	Jalan dan Jembatan			
68	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	7,864,297,405	7,505,061,750	95.43%
69	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2,933,763,577	2,923,876,000	99.66%
70	Program Pengendalian Banjir	3,190,307,900	3,190,307,900	100.00%
71	Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	3,528,264,000	2,191,686,650	62.12%
72	Program Infrastruktur Perdesaan	623,880,000	619,252,000	99.26%
73	Program Pengembangan Perumahan	12,722,343,480	12,540,625,015	98.57%
74	Program Perencanaan Tata Ruang	26,300,000	26,300,000	100.00%
75	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	590,298,000	589,098,000	99.80%
76	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	702,572,500	702,172,500	99.94%
77	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	104,500,000	104,495,000	100.00%
78	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	138,000,000	138,000,000	100.00%
79	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	659,206,225	550,083,000	83.45%
80	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28,980,000	28,980,000	100.00%
81	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	42,112,500	42,112,500	100.00%
82	Program Keluarga Berencanaan	31,834,000	31,834,000	100.00%
83	Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU	41,876,000	41,876,000	100.00%
84	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	45,000,000	45,000,000	100.00%
85	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	371,500,000	371,200,000	99.92%
86	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	187,500,000	187,444,000	99.97%
87	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	232,690,000	232,600,000	99.96%
88	Program Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	120,295,000	120,253,000	99.97%
89	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	122,100,000	120,295,000	98.52%
90	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	14,400,000	14,400,000	100.00%
91	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	167,530,000	167,470,000	99.96%
92	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	38,500,000	38,500,000	100.00%

93	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	81,125,000	71,125,000	87.67%
94	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	445,242,000	420,017,000	94.33%
95	Program Dakwah dan Peribadatan	3,694,753,560	3,622,111,600	98.03%
96	Program Bina Hukum Syari'at Islam	702,204,000	681,446,000	97.04%
JUMLAH		239,016,503,499	201,812,412,955	84,43 %

Sumber: DPKKD 2014

Berdasarkan tabel diatas, bahwa realisasi anggaran sesuai setelah perubahan anggaran sebesar Rp. **239,016,503,499** dengan realisasi **201,812,412,955** sedangkan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 84,42 % dengan kategori **baik**.

Namun untuk mengetahui secara rinci mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Singkil, Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil telah menetapkan Qanun Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil dengan alokasi sebesar Rp.649.017,750,751.28 dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.68

Realisasi anggaran pendapatan dan pembiayaan Kabupaten Aceh Singkil
Perubahan Anggaran tahun 2014

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH				
1	PAD	35,577,442,663.00	27,702,694,693	77.87
2	Dana Perimbangan	454,786,058,479.00	457,272,586,218.00	100.6
3	Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah	158,654,249,609.28	146,099,168,774.72	92.09
Jumlah		649,017,750,751.28	631,074,449,685	97.24
BELANJA DAERAH				
1	Belanja Tidak Langsung	259,606,317,956.00	232,223,359,276.00	89.45
2	Belanja Langsung	420,454,777,274.00	370,932,982,218.00	88.22
Jumlah		680,061,095,230.00	603,156,341,494.00	88.69
PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	32,243,344,479.61	32,243,344,479.61	100

2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1,200,000,000.00		
Jumlah		31,043,344,479.61	32,243,344,479.61	103,86

Sumber: DPKKD 2014 sebelum di audit BPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan capaian belum optimal karena secara keseluruhan realisasi anggaran pendapatan baru mencapai Rp. 631,074,449,685 atau 97.24% dari Rp. 649,017,750,751.28.

Sedangkan realisasi anggaran pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp.32,243,344,479.61 mampu direalisasikan sebesar Rp. 32,243,344,479.61 atau 100 %.

Berdasarkan komposisi Anggaran Belanja Aceh Singkil tahun 2014 yang berjumlah Rp. 603,156,341,494.00 yan terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 232,223,359,276.00, dan Belanja Langsung Rp. 370,932,982,218.00.

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2014 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2013-2017).

Diantara 51 Sasaran Strategis terdapat 1 Sasaran strategis dengan kategori **Sangat Baik**, 35 Sasaran Strategis Kategori **Baik**, 9 Sasaran Strategis Kategori **Cukup** dan 6 Sasaran Strategis Kategori **Kurang**.

Akumulasi tingkat capaian kinerja rata-rata berdasarkan 51 sasaran strategis memperoleh nilai rata-rata sebesar 78.45% dengan Kategori Baik. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja secara akumulatif diakui belum diikuti dengan tingkat capaian yang optimal setiap indikator kinerja pada sasaran strategis. Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain peneran sistem perencanaan kinerja yang belum optimal, sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih rendah, serta perubahan iklim dan topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam pencapaian program dan kegiatan pembangunan.

Dalam menimalisir kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan berbagai upaya perbaikan melalui melakukan Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Aceh dalam rangka Perbaikan dokumen perencanaan agar tercapainya sistem perencanaan yang berbasis kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan rencana anggaran sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Kabupaten (SKPK) serta peningkatan SDM yang berbasis kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 yang merupakan salah satu media pertanggungjawaban kinerja dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis serta pencapaian terhadap setiap indikator Kinerja Pembangunan Daerah.